

**JURNAL**

**PENENTUAN PRODUK  
UNGGULAN DAERAH DALAM  
PERSPEKTIF PENTA HELIX  
DI KABUPATEN TRENGGALEK**



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan ekonomi daerah, maka suatu daerah diharapkan untuk fokus pada potensi sektor/sub sektor unggulan yang ada pada daerah tersebut. Kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi sektor/sub sektor unggulan dapat menciptakan ide-ide baru, pertumbuhan usaha, industri dan lapangan kerja yang akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah. Kabupaten Trenggalek memiliki skor daya saing daerah sebesar 2,84 pada tahun 2022. Angka ini dibawah skor daya saing daerah provinsi dan nasional, sehingga diperlukan perhatian lebih lanjut untuk peningkatan daya saing daerah, utamanya aspek Pasar dan Ekosistem Inovasi.

Pada aspek Pasar, masih terdapat permasalahan seperti dominasi UKM dibanding industri besar sedang, kesenjangan upah tenaga kerja laki-laki dan perempuan, rendahnya ukuran pasar dan alokasi investasi yang masih rendah dibanding daerah lain. Sedangkan pada aspek Ekosistem Inovasi, masih terdapat permasalahan terkait masih rendahnya kapabilitas inovasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan penguatan pembangunan perekonomian. Struktur ekonomi Kabupaten Trenggalek masih di dominasi lapangan usaha primer, terutama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan potensi nilai tambah bagi Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya untuk pengembangan sektor tersebut, diperlukan pemetaan sektor unggulan sampai ke produk unggulan daerah.

Adanya produk unggulan daerah, akan memudahkan *stakeholder* dalam mengambil langkah strategis pembangunan daerah dan dapat dijadikan sebagai bahan tahap awal perencanaan pembangunan ekonomi lokal. Secara regulasi, pengembangan produk unggulan daerah juga telah diamanatkan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan riset penentuan produk unggulan daerah berdasarkan perspektif pentahelix yang terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, sektor bisnis, komunitas, dan media massa.

Jurnal Penentuan Produk Unggulan Daerah dalam Perspektif Penta Helix di Kabupaten Trenggalek ini merupakan laporan akhir hasil riset yang berisi Pendahuluan; Telaah Literatur; Metodologi Penelitian; Hasil dan pembahasan; serta Penutup. Kami, sebagai tim penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung penyusunan Jurnal ini. Semoga bermanfaat bagi semua pihak dan kami senantiasa membuka dan menerima kritik dan saran demi penyempurnaan Jurnal ini. Terima kasih.

Ketua

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>Pendahuluan</b> .....	1
<b>Telaah Literatur</b> .....	6
Pengembangan Ekonomi Lokal.....	7
Sektor Unggulan Daerah.....	8
Produk Unggulan Daerah .....	9
Kolaborasi Pentahelix.....	11
<b>Metodologi Penelitian</b> .....	12
1. Analisis LQ .....	12
2. Analisis Shift Share .....	12
3. Analisis Tipologi Klassen.....	13
4. Cochran Test.....	14
5. Analisis AHP .....	14
<b>Hasil dan Pembahasan</b> .....	15
1. Sektor Unggulan.....	15
2. Penentuan Kriteria Produk Unggulan Daerah .....	25
3. Prioritas Produk Unggulan Daerah .....	27
<b>Penutup</b> .....	50

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Komoditas Unggulan .....	5
Tabel 2	Kriteria Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 3	Kriteria Penentuan Produk Unggulan Daerah .....	10
Tabel 4	Tipe Pertumbuhan Berdasarkan PS dan DS.....	12
Tabel 5	Klasifikasi Sektor PDRB menurut Analisis Tipologi Klasen .....	13
Tabel 6	Kontribusi PDRB ADHK Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022 (persen) .....	15
Tabel 7	Kontribusi PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022 (persen) .....	17
Tabel 8	PDRB ADHK Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022 (juta rupiah).....	18
Tabel 9	PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022 (juta rupiah).....	19
Tabel 10	Rata-Rata Nilai Location Quotient (LQ) Kabupaten Trenggalek .....	21
Tabel 11	Analisis Shift Share.....	21
Tabel 12	Analisis Tipologi Klassen .....	21
Tabel 13	Kriteria Produk Unggulan Daerah Berdasarkan Tinjauan Literatur .....	25
Tabel 14	Jawaban Responden Untuk Uji Cochran .....	26
Tabel 15	Hasil AHP Perbandingan Kriteria dari Aktor Akademisi .....	28
Tabel 16	Hasil AHP Perbandingan Kriteria dari Aktor Swasta.....	28
Tabel 17	Hasil AHP Perbandingan Kriteria dari Aktor Komunitas.....	29
Tabel 18	Hasil AHP Perbandingan Kriteria dari Aktor Pemerintah.....	29
Tabel 19	Hasil AHP Perbandingan Kriteria dari Aktor Media Massa .....	29
Tabel 20	Hasil AHP Perbandingan Kriteria dari Aktor Hasil AHP Perbandingan Kriteria Gabungan (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media Massa).....	30
Tabel 21	Hasil AHP Perbandingan Alternatif Produk terhadap Kriteria Sumbangan Terhadap Ekonomi Daerah.....	31
Tabel 22	Hasil AHP Perbandingan Alternatif Produk terhadap Kriteria Penyerapan Tenaga Kerja.....	32
Tabel 23	Hasil AHP Perbandingan Alternatif Produk terhadap Kriteria Sektor Basis dan Berdaya Saing .....	33
Tabel 24	Hasil AHP Perbandingan Alternatif Produk terhadap Kriteria Ramah Lingkungan .....	34
Tabel 25	Hasil AHP Perbandingan Alternatif Produk terhadap Kriteria Ketersediaan Pasar .....	36
Tabel 26	Hasil AHP Perbandingan Alternatif Produk terhadap Kriteria Ketersediaan Bahan Baku .....	37
Tabel 27	Hasil AHP Perbandingan Alternatif Produk terhadap Kriteria Keterkaitan dengan Sektor Lainnya .....	39

Tabel 28	Hasil AHP Perbandingan Alternatif Produk terhadap Kriteria Dukungan Pemerintah.....	40
Tabel 29	Hasil AHP Perbandingan Alternatif Produk terhadap Kriteria Kondisi Input.....	41
Tabel 30	Prioritas Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Trenggalek.....	43
Tabel 31	Produksi Tanaman Pangan (dalam ton) .....	44
Tabel 32	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut.....	46
Tabel 33	Produksi Perikanan dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap tahun 2022 .....	46
Tabel 34	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya .....	47
Tabel 35	Produksi Perkebunan.....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Komponen dan Pilar IDSD.....	3
Gambar 2	Pengembangan Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan.....	4
Gambar 3	Rata-Rata Kontribusi Sektoral Kabupaten Trenggalek.....	18
Gambar 4.	Kuadran Shift Share Sektor Ekonomi Kabupaten Trenggalek .....	23
Gambar 5.	Kuadran Tipologi Klassen .....	24
Gambar 6.	Ranking Produk Unggulan Berdasarkan Kriteria .....	44



Commentaries

## **PENENTUAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF PENTA HELIX di KABUPATEN TRENGGALEK**

Harendhika Lukiswara <sup>a1</sup>  
Ulya Awwalul Mar'ah <sup>b</sup>  
Anindita Diesti Sabdorahso<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup> Staf Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek

### **Abstrak**

Pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu strategi pencapaian tujuan pembangunan dan daya saing daerah. Namun, keterbatasan sumber daya yang dimiliki, membuat daerah harus cerdas dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki. Pembangunan harus fokus pada sektor yang mampu menjadi penggerak bagi kemajuan daerah. Sektor tersebut kemudian diperinci lagi menjadi produk unggulan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis Location Quotient (LQ), Shifshare, Klassen, dan Analyze Hierarchy Process (AHP). Data diperoleh dengan cara survey sekunder dan kuesioner kepada stakeholder pentahelix. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur ekonomi di Kabupaten Trenggalek masih mengandalkan sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Menurut persepsi stakeholder pentahelix, produk unggulan daerah Kabupaten Trenggalek adalah tanaman pangan, perikanan, dan perkebunan. Ketiga produk unggulan tersebut berdasarkan pada kriteria prioritas yaitu sumbangan terhadap ekonomi, ketersediaan bahan baku, dan pasar.

Keyword: produk unggulan daerah, pentahelix

### **Pendahuluan**

Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Secara ekonomi, otonomi daerah diharapkan mampu menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah serta membuka peluang pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perijinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya (Suparto, 2017).<sup>2</sup>

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan ekonomi daerah, diharapkan fokus pada potensi sektor/sub sektor unggulan yang ada di daerah tersebut. Menurut Tarigan (2014:79)<sup>3</sup> "kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan

<sup>1</sup> Email: [trenggalek.litbang@gmail.com](mailto:trenggalek.litbang@gmail.com)

<sup>2</sup> Suparto, Suparto 2017. *Otonomi Daerah di Indonesia : Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya*. In: Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan, FISIPOL Univ. Maritim Raja Ali Haji.

<sup>3</sup> Tarigan, Robinson, 2014. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, Edisi Revisi Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

di wilayahnya menjadi semakin penting, sektor yang memiliki keunggulan memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang”. Kenyataannya, konsep pembangunan yang ada di Indonesia masih didominasi oleh paradigma pembangunan pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2012:9).<sup>4</sup> Maka dari itu, pembangunan daerah lebih banyak didasarkan pada potensi sektor/ subsektor unggulan yang dilihat dari kacamata keekonomian.

Kemampuan daerah dalam menumbuhkembangkan ekosistem dan iklim usaha yang kondusif akan menciptakan ide-ide baru, pertumbuhan usaha, industri dan lapangan kerja yang akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah. Daya saing daerah merupakan kemampuan daerah untuk menyinergikan input, output, serta *outcome* yang ada di daerahnya secara berkelanjutan, agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional yang pada akhirnya mampu meningkatkan standar hidup masyarakatnya (BI, 2008 dalam Fasyah, Daryanto, Suprayitno, 2016)<sup>5</sup>

Pemerintah pusat melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan pengukuran terhadap daya saing melalui instrumen Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bertujuan untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.<sup>6</sup> Kerangka pengukuran IDSD mengacu pada *Global Competitiveness Index (GCI)*, 2019 dan *World Economic Forum (WEF)*, 2019, yang terdiri dari empat komponen pembentuk yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.

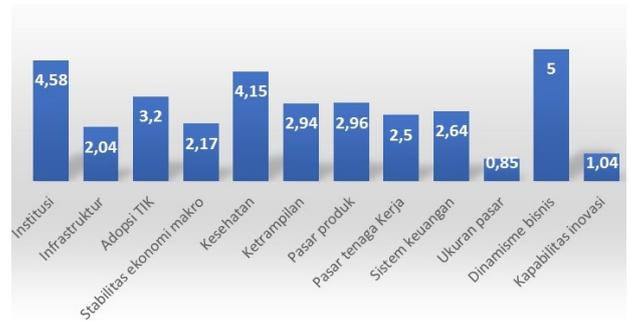
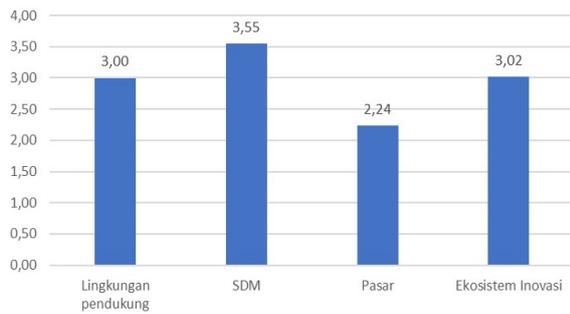
Kabupaten Trenggalek memiliki skor IDSD sebesar 2,84 pada tahun 2022. Angka ini masih dibawah skor IDSD provinsi sebesar 3,74 dan skor IDSD nasional sebesar 3,26. Komponen yang memiliki skor indeks tertinggi adalah SDM dengan skor 3,55 sedangkan komponen yang memiliki skor indeks terendah adalah Pasar dengan skor 2,24. Namun apabila dilihat dari skor pilar, pilar dengan skor > 3 adalah Institusi, Adopsi TIK, Kesehatan, dan Dinamika bisnis sedangkan yang < 3 adalah Infrastruktur, Stabilitas ekonomi makro, Keterampilan, Pasar produk, Pasar tenaga kerja, Sistem keuangan, Ukuran pasar, dan kapabilitas inovasi.

---

<sup>4</sup> Kuncoro, Mudrajad, 2012. *Perencanaan Daerah, Bagaimana Membangun ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan?*. Jakarta: Salemba Empat

<sup>5</sup> FasyahD. N., Daryanto H. K., & Suprayitno G 2017. Penentuan Produk Unggulan Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Industri Agro di Kabupaten Bogor. *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 11(2), 103-110. <https://doi.org/10.29244/mikm.11.2.103-110>

<sup>6</sup> Widiyanto, Yudi, et., al., 2022. *Indeks Daya Saing Daerah 2022*. Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional. DOI: <https://doi.org/10.55981/brin.750>



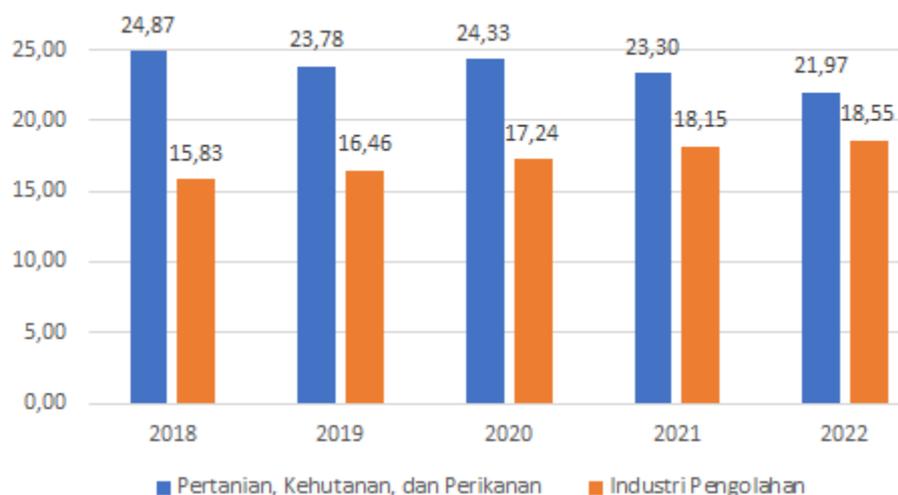
Sumber: BRIN, 2023  
Gambar Komponen dan pilar IDSD

Berdasarkan kondisi tersebut, setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang harus mendapatkan perhatian dalam pembangunan di Kabupaten Trenggalek yaitu Pasar dan Ekosistem Inovasi. Kondisi pasar di Kabupaten Trenggalek masih didominasi oleh UKM dibandingkan industri besar sedang, dan masih terdapat kesenjangan antara upah dan gaji perempuan dan laki-laki. Dari segi *demand*, ukuran pasar juga masih rendah yang diukur dengan indikator PDRB ADHK dan nilai impor. Alokasi sumber daya dan investasi dalam bentuk sistem keuangan juga masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain. Terdapat keterbatasan penyaluran KUR dibandingkan dengan jumlah penduduk, pembiayaan lembaga ventura dan masih adanya kredit bermasalah.<sup>7</sup>

Pembangunan ekonomi dalam dasawarsa terakhir juga mengalami pergeseran paradigma yaitu dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Tentunya pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan harus memperhatikan ekosistem inovasi. Ekosistem inovasi terdiri dari dinamika bisnis dan kapabilitas inovasi. Dinamika bisnis di Kabupaten Trenggalek cukup baik dilihat dari rendahnya biaya untuk memulai usaha dan waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha juga tidak lama. Namun, kapabilitas inovasi Kabupaten Trenggalek masih sangat rendah diukur dari jumlah publikasi ilmiah, pengajuan kekayaan intelektual, belanja riset, serta indeks keunggulan lembaga riset.<sup>8</sup>

Struktur ekonomi Kabupaten Trenggalek masih didominasi oleh sektor lapangan usaha primer terutama sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata proporsi terhadap total PDRB sebesar 23,65%. Namun angka tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu sebesar 29,45% pada tahun 2010 menjadi 21,97% pada tahun 2022. Berbeda dengan itu, sektor industri pengolahan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 14,28% pada tahun 2010 menjadi 18,55% tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Trenggalek semakin kesini tidak hanya mengandalkan komoditas mentah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan mulai menjalankan industrialisasi meskipun dalam skala yang kecil.

<sup>7</sup> ibid  
<sup>8</sup> ibid



Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek, 2023

Gambar Perkembangan Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan

Berdasarkan struktur ekonomi secara keseluruhan, sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki potensi nilai tambah yang cukup besar bagi Kabupaten Trenggalek. Sektor ini harus mendapatkan intervensi pemerintah yang lebih fokus dan intens agar tidak menjadi “sapi perah” bagi daerah yang memiliki industri yang kuat. Friedman dan Alonso dalam Pradigda (2017)<sup>9</sup> menyatakan bahwa daerah kaya yang berkembang dengan sangat cepat juga bertindak sebagai pompa penghisap dan menarik elemen-elemen yang dinamis dari daerah statis.

Setelah mengetahui sektor lapangan usaha yang potensial dikembangkan dimasa mendatang, lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam upaya pembangunan (ekonomi) daerah? Kuncoro (1997)<sup>10</sup> menyatakan bahwa dalam menetapkan kebijakan pembangunan dan pengembangan sektoral perekonomian daerah, hendaknya lebih diprioritaskan sektor unggulan yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota dengan tetap memperhatikan secara proporsional sektor lainnya. Sektor unggulan sendiri dapat diperinci lagi sampai ke produk unggulan daerah. Dengan adanya produk unggulan daerah, akan memudahkan stakeholder di daerah dalam mengambil langkah strategis pembangunan daerah. Identifikasi produk unggulan daerah juga merupakan tahap awal perencanaan pembangunan ekonomi lokal (Blakely and Bradshaw, 2002).<sup>11</sup> Sejalan dengan mereka, Tarigan (2009)<sup>12</sup> juga menyimpulkan bahwa analisis potensi ekonomi lokal dengan penentuan sektor riil yang memiliki keunggulan akan memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

Secara regulasi, pengembangan produk unggulan daerah telah diamanatkan pelaksanaannya oleh pemerintah pusat melalui instrumen Permendagri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman

<sup>9</sup> Pradigda, Eyuda Angga, 2016. Strategi Perencanaan Pembangunan Industri Berbasis Produk Unggulan Daerah. Tesis Magister Administrasi Publik. Malang: Universitas Brawijaya

<sup>10</sup> Kuncoro, Mudrajad, 1997. Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

<sup>11</sup> Blakely, Edward J. And Ted K. Bradshaw, 2002. Planning Local Economic Development: Theory and Practice, second edition. London: Sage Publications.

<sup>12</sup> Tarigan, R. 2009. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, produk unggulan daerah merupakan produk baik barang maupun jasa, yang dihasilkan koperasi, usaha kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk potensial yang memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

Menurut beberapa penelitian terdahulu, ternyata pengembangan produk unggulan daerah di beberapa tempat masih terkendala beberapa permasalahan. Triharini, et., al, 2014<sup>13</sup> menemukan bahwa produk unggulan daerah masih terkendala lemahnya sistem pendukung seperti sumberdaya manusia, permodalan, pemasaran, difusi IPTEK, kemitraan usaha, infrastruktur, dan kelembagaan. Harga produk juga masih tergolong tinggi padahal kualitas produk masih rendah. Hal ini karena proses produksi masih dilakukan secara tradisional (Salisbury, et., al, 2018<sup>14</sup> dan Donaher & Lynes, 2017<sup>15</sup>). Oleh karena itu pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung agen ekonomi (khususnya UKM) untuk menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi karakteristik lokal yang unggul (Nakagawa, 2012)<sup>16</sup>; (Niskha & Vesala, 2013)<sup>17</sup>; dan (Sambajee & Dhomon, 2015).<sup>18</sup>

Kabupaten Trenggalek sendiri memiliki banyak komoditas (dan produk) unggulan terutama dari sektor lapangan usaha pertanian dengan jenis sayuran, buah-buahan, biofarmaka, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Selain itu, Kabupaten Trenggalek juga memiliki berbagai produk unggulan non pangan seperti batik, olahan bambu, dan genteng. Sampai dengan saat ini (tahun 2023), Kabupaten Trenggalek juga belum memiliki masterplan produk unggulan daerah.

Tabel Komoditas Unggulan

No	Jenis	Komoditas
1	Sayuran	Bayam, buncis, jamur, kacang panjang, kangkung, labu siam, jengkol, petai
2	Buah-buahan	Alpukat, durian, manggis, salak, melon
3	Biofarmaka	Kapulaga, laos, lempuyang, temulawak
4	Perkebunan	Kelapa, kakao
5	Peternakan	Sapi, kerbau, kambing, domba
6	Perikanan	Tongkol, cakalang, nila, lele, udang

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, 2020

<sup>13</sup> Triharini, M., Larasati, D., dan Susanto, R. 2014. Pendekatan One Village One Product (OVOP) untuk Mengembangkan Potensi Kerajinan Daerah. Studi Kasus: Kerajinan Gerabah di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. ITB J. Vis Art & Des, 6 (1).

<sup>14</sup> Adalisbury, et., al., 2018. Is Local Produce Really More Expensive? A Comparison of Direct Market and Conventional Grocery Produce Pricing. Journal of Food Distribution Research. Vol. 49. Hal. 13-21. DOI: [10.22004/ag.econ.274599](https://doi.org/10.22004/ag.econ.274599)

<sup>15</sup> Donaher & Lynes, 2017. Is Local Produce More Expensive? Challenging Perceptions of Price in Local Food System. Local Environment. Vol. 22, Issue 6. Hal 746-763

<sup>16</sup> Nakagawa, R. 2012. The Policy Approach In Promoting Small And Medium Sized Enterprises In Japan. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 11(10), 1087–1098. <https://doi.org/10.19030/iber.v11i10.7254>

<sup>17</sup> Niska, Miira & Kari Mikko Vesala. 2012. SME Policy Implementation as a Relational Challenge. DOI: <https://doi.org/10.1080/08985626.2013.798354>

<sup>18</sup> Sambajee, P., & Dhomon, M. Z. 2015. Government and SME's in the Maldives and Mauritius. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 21(6).

Sampai dengan hari ini, birokrasi selalu dihadapkan pada permasalahan keterbatasan sumber daya baik SDM maupun anggaran. Terkait dengan hal tersebut, maka sudah menjadi kebutuhan untuk menentukan prioritas pengembangan. Sebaiknya, produk unggulan daerah yang dipilih nantinya memang benar-benar produk yang memiliki keterkaitan *backward* dan *forward linkage* yang kuat dan berdampak pada penghidupan masyarakat Kabupaten Trenggalek secara luas.

Jika melihat beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa metode dalam penentuan produk unggulan daerah dengan terlebih dahulu menentukan sektor/sub sektor basis. Untuk menentukan sektor basis, biasanya peneliti menggunakan *metode location quotient* (LQ) (Nusantoro, 2011<sup>19</sup>; Alian dan Ciptomulyo, 2013<sup>20</sup>) Selanjutnya, penentuan produk unggulan daerah sebagian besar menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) (Subagyo dan Wahyudi, 2008<sup>21</sup>; Pono, 2010<sup>22</sup>; Nurcahyo, 2011<sup>23</sup>; Bank Indonesia, 2013<sup>24</sup>; Rahab et., al., 2013<sup>25</sup>) Sejalan dengan mereka, Mahmudi dan Tahwin (2016)<sup>26</sup> mengkombinasikan metode AHP dan TOPSIS dalam menentukan produk unggulan daerah. Selain AHP dan TOPSIS, sebenarnya terdapat banyak metode penentuan keputusan menggunakan *weighting multiple criteria* seperti Metode Eckenrode yang digunakan oleh Anggraeni, et., al., 2019.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Bappedalitbang melakukan riset penentuan produk unggulan daerah berdasarkan perspektif pentahelix yang terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, sektor bisnis, komunitas, dan media massa. Harapannya penentuan produk unggulan daerah ini akan menjadi landasan pembentukan komitmen antar aktor pembangunan dalam upaya mengembangkan ekonomi lokal di Kabupaten Trenggalek. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menentukan sektor unggulan daerah; 2) Menentukan kriteria penentuan produk unggulan daerah; 3) Menentukan prioritas produk unggulan daerah.

## Telaah Literatur

### Pengembangan ekonomi lokal

---

<sup>19</sup> Nusantoro, Jawoto. 2011. Model Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Pendekatan Klaster Di Provinsi Lampung. Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan UNIMUS

<sup>20</sup> Alian, Mochamad Rifqi. dan Udisubakti Ciptomulyono, 2013. Penentuan Dan Pengembangan Komoditas Unggulan Klaster Agroindustri Dalam Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Malang. Tesis. ITS: Surabaya

<sup>21</sup> Subagyo Daryono dan M. Wahyudi. 2008. Analisis Kompetensi Produk Unggulan Daerah Pada Batik Tulis Dan Cap Solo Di Dati II Kota Surakarta. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 9, No. 2, hal. 184 – 197. Solo: UMY

<sup>22</sup> Pono, Maat. 2010. Strategi Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah. Majalah Ekonomi. Melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/4121-ID-strategi-pengembangan-kompetensi-inti-industri-daerah-kabupaten-tojo-una-una-sul.pdf>. Diakses: 18/08/23

<sup>23</sup> Nurcahyo, R., et., al., 2012. Penentuan Dan Pengembangan Kompetensi Inti Kabupaten Bekasi. *Jurnal Teknik Industri*, 13(1), 37–42. <https://doi.org/10.22219/JTIUMM.Vol13.No1.37-42>

<sup>24</sup> Bank Indonesia, 2013. Komoditi/Produk/Jenis Usaha Kota Malang. Malang: Bank Indonesia.

<sup>25</sup> Rahab, et al. 2013. Local Economic Development Strategy Based on Localindustrial Core Competence. *International Journal of Business and Management*; Vol. 8, No. 16, 41-47. Melalui: <https://ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/24603>. Diakses: 18/08/23

<sup>26</sup> Mahmudi, A. Aviv, dan Muhammad Tahwin, (tahun tidak diketahui). Penentuan Produk Unggulan Daerah Menggunakan Kombinasi Metode AHP dan TOPSIS. *Jurnal Informatika Upgris*. Vol. 2, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.26877/jiu.v2i2.1265>

<sup>27</sup> Anggraeni, Shanti Kirana, et., al., 2019. Incrasing Regional Competitiveness Through Suoerior Agroindustry Products. *International Journal of Advanced Research (IJAR)*. DOI: <http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/10184>

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan hubungan kerja sama kolektif antara pemerintah, dunia usaha, serta sektor non pemerintah dan masyarakat untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya merangsang dan menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan (Rahma, 2012 dalam Rozikin, 2021).<sup>28</sup> Peran pemerintah daerah dalam PEL sangatlah penting sebagai inisiator, koordinator, fasilitator dan stimulator. Pemerintah daerah juga berperan dalam penyediaan infrastruktur dan aktivitas industri sejalan dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat (Muda, et.al., 2018).<sup>29</sup> PEL memiliki tujuan utama menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan menciptakan lapangan kerja (Sovacool et., al., 2016).<sup>30</sup> PEL juga harus mampu membangun kapasitas masyarakat yang lebih baik dalam mengelola perubahan. Setidaknya terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam PEL diantaranya:

### 1. *Competitiveness development*

Daya saing daerah sangat dipengaruhi oleh faktor pengembangan komoditas (juga produk) lokal (Malysheva, Shinkevich, Kharisova, & Nuretdinova, 2016)<sup>31</sup>. Penentuan dan pemilihan komoditas dalam menentukan daya saing sangat penting, mengingat yang menentukan daya saing adalah komoditas.

### 2. *Cluster development*

Berupa kerangka kerja bagi pemerintah daerah untuk menyediakan jasa layanan terhadap kluster-kluster industri yang berdampak maksimum (Seo & Coo, 2017).<sup>32</sup>

### 3. *Institutional development*

Pembentukan formal dan informal kelembagaan untuk melengkapi aktivitas ekonomi berdasarkan hubungan/interaksi yang ada di masyarakat berdasarkan norma dan kepercayaan (Pathak & Muralidharan, 2016).<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup> Rozikin, Mochammad, dan Rillia Aisyah Haris, 2021. Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Lokal di Kabupaten Sumenep: Pendorong dan Penghambat. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Malang: Universitas Merdeka. DOI: <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i2.6201>

<sup>29</sup> Muda, I., Siregar, H., et., al., 2018. Economic Value of Palm Plantation in North Sumatera and Contribution to Product Domestic Regional Bruto. Science and Engineering PAPER (pp. 1-6). DOI: <https://doi.org/10.1088/1757-899X/288/1/012080>

<sup>30</sup> Sovacool, B. K., et., al., 2016. Energy Governance , Transnational Rules , and the Resource Curse : Exploring the Effectiveness of the Extractive Industries Transparency Initiative. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.01.021>

<sup>31</sup> Malysheva, T. V., Shinkevich, A. I., Kharisova, G. M., & Nuretdinova, Y. V. 2016. The Sustainable Development of Competitive Enterprises through the Implementation of Innovative Development Strategy. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(1), 185-191.

<sup>32</sup> Seo, D., & Coo, B. 2017. The Global Distribution Direction of Defense Industry in Eastern Europe under the New Cooperation Strengthened. Journal of Distribution Science, 15(1), 83-93. DOI: <https://doi.org/10.15722/jds.15.1.201701.83>

<sup>33</sup> Pathak, S., & Muralidharan, E. 2016. Informal Institutions and Their Comparative Influences on Social and Commercial Entrepreneurship: The Role of In-Group Collectivism and Interpersonal Trust. Journal of Small Business Management, 54, 168-188. DOI: <https://doi.org/10.1111/jsbm.12289>

#### 4. *Human resource development*

Dalam konteks proses produksi, penguasaan teknik yang baik oleh SDM, akan mendorong inovasi teknologi. Inovasi teknologi akan mendorong berbagai penemuan produk baru dan efisiensi produksi (Koji & Bae, 2015).<sup>34</sup>

#### 5. *Technology mastery*

Penguasaan teknologi berkaitan dengan bagaimana proses produksi dikombinasikan untuk mencapai target produksi (Ryu, 2019).<sup>35</sup>

### Sektor unggulan daerah

Sektor unggulan daerah merupakan sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input proses produksi (Widodo, 2006).<sup>36</sup> Sektor unggulan juga merupakan sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. Sektor unggulan penting bagi pembangunan ekonomi wilayah tidak hanya mengacu pada lokasi geografis melainkan juga sektor yang menyebar dalam berbagai sektor ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Adapun kriteria sektor unggulan menurut beberapa penelitian antara lain:

Tabel Kriteria Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Penelitian Terdahulu

Sambodo dalam Masloman (2019) <sup>37</sup>	Arifin & Rachbini (2001) <sup>38</sup>	Ambardi dan Prihawantoro (2002) <sup>39</sup>
1. Laju pertumbuhan ekonomi tinggi	1. Permintaan produk cukup besar	1. Kontribusi signifikan terhadap produksi, pendapatan, dan pengeluaran
2. Penyebaran relatif besar	2. Adopsi teknologi	2. Keterkaitan ke dapan dan ke belakang kuat
3. Keterkaitan kedepan dan ke belakang tinggi	3. Peningkatan investasi	3. Mampu bersaing di pasar nasional dan internasional
4. Nilai tambah tinggi	4. Memberikan pengaruh terhadap sektor lainnya	4. Keterkaitan dengan daerah lain
		5. Intervensi inovasi teknologi
		6. Menyerap tenaga kerja
		7. Berkelanjutan
		8. Resiliense
		9. Dukungan sosial, budaya, pasar, kelembagaan

<sup>34</sup> Koji, Y., & Bae, I. 2015. Overseas Expansion Support to Small and Medium Enterprises: The Case of Japan and Germany. *Journal of Distribution Science*, 13(7), 53-61. DOI: <https://doi.org/10.15722/jds.13.7.201507.53>

<sup>35</sup> Ryu, J. S. 2019. Is Consumer Characteristics and Shopping for Fashion in the Omni-channel Retail Environment. *Journal of Business, Economics and Environmental Studies*, 9(4), 15-22. DOI: <https://doi.org/10.13106/jbees.2019.vol9.no4.15>

<sup>36</sup> Rusliah, 2021. Strategi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Unggulan di Kabupaten Gowa. Tesis: Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Makasar: Universitas Hasanudin.

<sup>37</sup> *ibid*

<sup>38</sup> *ibid*

<sup>39</sup> *ibid*

Sambodo dalam Masloman (2019) <sup>37</sup>	Arifin & Rachbini (2001) <sup>38</sup>	Ambardi dan Prihawantoro (2002) <sup>39</sup>
		10. Berorientasi kelestarian sumber daya dan lingkungan

Pada umumnya, penentuan sektor unggulan dilakukan dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah. PDRB dapat digunakan untuk melihat output sektor ekonomi, bagaimana kontribusi masing-masing sektor dan tingkat pertumbuhannya di dalam wilayah tersebut. Penentuan sektor unggulan juga penting dalam perencanaan daerah.<sup>40</sup>

### Produk unggulan daerah

Seringkali, produk unggulan daerah masih sering rancu pengertiannya dengan komoditas unggulan daerah. Secara konsep, komoditas merupakan sesuatu yang berasal langsung dari alam atau hasil dari alam secara alamiah. Misalnya hasil-hasil pertanian seperti padi, sayur, buah. Sedangkan produk merupakan komoditas yang telah mengalami pengolahan lebih lanjut seperti padi yang telah diolah menjadi tepung. Setiap komoditas maupun produk tidak bisa serta merta disebut unggul karena untuk menjadi unggulan daerah, harus memenuhi persyaratan tertentu.

Produk unggulan daerah merupakan komoditas baik berbentuk barang atau jasa yang berada di daerah tertentu dan menjadi kekayaan lokal yang mempunyai potensi ekonomi dan daya saing tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja yang berada di kawasan tersebut, yang diolah berdasarkan kearifan lokal dan mampu diserap oleh pasar baik domestik ataupun luar sehingga mampu berkembang dan mendorong perekonomian lokal di kawasan tersebut.<sup>41</sup>

Pengembangan produk unggulan daerah merupakan penjabaran dari PEL. Dalam PEL, inventarisasi potensi wilayah/masyarakat/daerah mutlak diperlukan agar dapat dirumuskan dengan baik pola kebijakan baik sektoral maupun multisektoral. Salah satu upaya mengidentifikasi potensi ekonomi daerah tersebut melalui identifikasi produk-produk potensial, andalan dan unggulan. Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, produktivitas dan investasi bagi daerah (Sudarsono, 2001 dalam Setiajtnika dan Astuti, 2022).<sup>42</sup> Sementara itu, Ahmadjayadi (2011) dalam Yufit, et., al., (2017),<sup>43</sup> menjelaskan produk unggulan daerah adalah unggulan daerah yang memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain dan ramah lingkungan. Suyanto (1999),<sup>44</sup> juga menekankan bahwa produk unggulan daerah tidak harus berupa produk fisik, tetapi juga dapat berupa produk budaya yang dikembangkan melalui modernisasi pengelolannya.

<sup>40</sup> ibid

<sup>41</sup> Permendagri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah

<sup>42</sup> Setiajtnika, E., & Dwi Astuti, Y. 2022. Potensi Produk Unggulan Daerah dan Strategi Pengembangannya di Kabupaten Kepulauan Aru. *Coopetition* : Jurnal Ilmiah Manajemen, 13(1), 97–114. DOI: <https://doi.org/10.32670/coopetition.v13i1.124>

<sup>43</sup> Yufit, Hendra, et., al., 2017. Strategi Pengembangan Produk Unggulan Lintas Wilayah Untuk Mendukung Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Magetan, Ponorogo, dan Pacitan. *Jurnal Cakrawala* Vol. 11 No. 1: 113-129.

<sup>44</sup> ibid

Menurut Huseini (dalam Pradigda, 2016),<sup>45</sup> produk unggulan adalah produk yang memberikan nilai tambah dan sumbangan pendapatan tertinggi pada suatu perekonomian daerah. Pendapat dari Huseini ini didasari pada aspek nilai dan kontribusi suatu produk. Produk yang memberikan nilai tambah tertinggi sepanjang rantai nilai dan memberikan kontribusi terbesar dari suatu perekonomian daerah adalah produk unggulan. Sehingga untuk mengetahui komoditas/ produk yang memberikan nilai tambah maka perlu dianalisis dengan dua pendekatan yaitu pendekatan pohon industri dan rantai nilai (*value chain*).

Pohon industri suatu komoditas pada dasarnya menggambarkan urutan suatu komoditas dari komoditas awal sampai produk akhir. Misalnya komoditas pala (layer 1), diolah menjadi minyak asiri (layer 2) dan kemudian minyak asiri diolah menjadi bahan obat-obatan (layer 3). Selanjutnya untuk menentukan nilai tambah maka digunakan konsep value chain (rantai nilai), dengan cara kita menghitung nilai dari tiap layer. Contoh: untuk komoditas pala, layer 1 (untuk 1 kg kering pala) seharga Rp. 60.000, jika diolah menjadi minyak asirin, untuk satu kg pala akan bernilai Rp. 120.000, dan jika keseluruhan minyak atsiri ini diolah menjadi obat-obatan maka akan bernilai Rp.200.000. Berdasarkan pendapat dari Huseini maka obat-obatan ini yang memiliki nilai tambah lebih besar sehingga disebut sebagai produk unggulan. Untuk syarat kedua, yaitu sumbangan pendapatan tertinggi pada suatu perekonomian daerah, dapat dianalisis dari nilai ekspor pada komoditas / produk pala dan turunannya. Jika nilai ekspor lebih besar pada produk layer 3 maka produk itu disebut unggul.

Permasalahannya adalah ketika suatu produk (pada layer 3) tidak seluruhnya menggunakan input bahan baku pada layer 2, sehingga walaupun memiliki *value added* yang tinggi namun secara total rendah. Atau walaupun memiliki *value added* tinggi, namun hanya dikuasai oleh beberapa orang atau perusahaan saja, tidak melibatkan masyarakat banyak (tidak mengakar di masyarakat). Beberapa penelitian dan regulasi menunjukkan bahwa selain *value added* dan dampak perekonomian terdapat beberapa kriteria penentuan produk unggulan daerah diantaranya:

Tabel Kriteria Penentuan Produk Unggulan Daerah

Sandrina (2015)	Pradigda (2016)	Yufit, et., al., (2017)	Permendagri No.9 tahun 2014
1. Tingkat daya saing	1. Produk unik/khas	1. Volume ekspor	1. Penyerapan tenaga kerja
2. Kondisi input	2. Sumbangan terhadap perekonomian daerah	2. Volume impor bahan baku	2. Sumbangan terhadap perekonomian
3. Pasar	3. Dampak terhadap lingkungan	3. Penyerapan tenaga kerja	3. Sektor basis ekonomi daerah
4. Keunikan produk	4. Daya saing	4. Pertumbuhan nilai tambah	4. Dapat diperbaharui
5. Kebijakan lembaga	5. Pasar	5. Keterkaitan antar sektor	5. Sosial budaya
6. Sumbangan ekonomi	6. Kondisi input (infrastruktur, SDM, teknologi, modal)	6. Konservasi lingkungan	6. Ketersediaan pasar
7. Kemitraan		7. Jangkauan pemasaran	7. Bahan baku
8. Dampak lingkungan			8. Modal

<sup>45</sup> Pradigda, Eyuda Angga, 2016. Strategi Perencanaan Pembangunan Industri Berbasis Produk Unggulan Daerah. Tesis Magister Administrasi Publik. Malang: Universitas Brawijaya

Sandrina (2015)	Pradigda (2016)	Yufit, et., al., (2017)	Permendagri No.9 tahun 2014
	7. Kemitraan 8. Dukungan kebijakan dan kelembagaan		9. Sarana dan prasarana produksi 10. Teknologi 11. Manajemen usaha 12. Harga

### Kolaborasi Pentahelix

Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama, interaksi, kompromi, beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat (Larantika, 2019).<sup>46</sup>

Ring dan Van de Ven (1994) sebagaimana dikutip Larantika (2019), menyediakan kerangka kerja tentang proses kolaborasi. Kerangka kerja tersebut menunjukkan bahwa elemen integratif terwujud dalam hubungan pribadi, kontrak psikologis, pemahaman informal serta komitmen untuk menggantikan elemen agregatif yang terwujud dalam peran organisasi formal dan kontrak hukum. Kerangka proses kolaborasi tersebut menurut Ring dan Van de Ven (1994) terdiri dari unsur:

1. *Negotiation*, yaitu tawar menawar saling menguntungkan dengan semua pihak, dimaksudkan jika organisasi yang terlibat dalam kolaborasi dapat melakukan negosiasi dengan harapan tindakan bersama
2. *Commitment*, membentuk kesepakatan yang disetujui bersama dan dilaksanakan di masa mendatang dengan berbagai interaksi.
3. *Implementation*, melaksanakan keputusan sesuai dengan perjanjian.
4. *Assessments*, menilai berdasarkan seluruh proses.

Pentahelix merupakan pengembangan dari konsep Triplehelix yang dikembangkan oleh teori Etzkowitz dan Leydesdorff (1995)<sup>47</sup> Pada mulanya konsep helix dikembangkan untuk mengkaji masalah inovasi industri. Namun, seiring berjalannya waktu konsep tersebut juga digunakan untuk inovasi kebijakan lainnya seperti pariwisata, pendidikan, kriminalitas, koperasi, IPTEK. Pentahelix melibatkan lima unsur yang sering disebut ABCGM yaitu kolaborasi antara Academic, Business, Community, Government dan Media (Muhyi, 2017).<sup>48</sup>

Penentuan produk unggulan daerah melalui pelibatan *pentahelix* di Kabupaten Trenggalek diharapkan menjadi langkah awal bentuk kolaborasi kedepannya. Dengan adanya komitmen antar pihak, maka pembangunan baik jangka menengah dan jangka panjang akan lebih terarah dan terfokus.

<sup>46</sup> Larantika, AA Ayu Dewi, Kolaborasi Aktor Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Disertasi. Fakultas Ilmu Administrasi. Malang: Universitas Brawijaya

<sup>47</sup> ibid

<sup>48</sup> ibid

## Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif untuk mendapatkan insight dari data-data yang diperoleh. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari BPS dan data primer melalui pengisian kuesioner dan wawancara terhadap responden kunci dengan teknik pengambilan sampel berupa purposive. Data BPS yang digunakan adalah data PDRB atas dasar harga konstan dalam beberapa tahun terakhir. Adapun metode analisis utama yang digunakan meliputi:

### 1. Analisis LQ

Untuk menentukan sektor unggulan, maka terlebih dahulu dilakukan analisis location quotient (LQ). Perhitungan analisis LQ menggunakan data PDRB harga konstan agar perubahan struktur ekonomi dapat diketahui tanpa terpengaruhi fluktuasi inflasi. Adapun data PDRB yang digunakan adalah PDRB Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Trenggalek 2018-2022.

### 2. Analisis Shiftshare

Analisis shift share biasanya dikombinasikan dengan analisis LQ. Setelah mengetahui sektor lapangan usaha yang menjadi basis, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis *shiftshare*. Analisis ini akan menghasilkan nilai *national share/provincial share*, *proportional shift* dan *differential shift*. *Proportional shift* menggambarkan pengaruh unsur-unsur eksternal yang bekerja secara provinsi. Sedangkan *differential shift* menggambarkan keunggulan komparatif suatu sektor. Sektor yang memiliki *differential shift* (DS) positif memiliki keunggulan komparatif terhadap sektor yang sama di tingkat wilayah lebih tinggi (Provinsi). Selain itu, sektor-sektor yang memiliki *differential shift* positif berarti bahwa sektor tersebut terkonsentrasi di daerah yang bersangkutan.

Dalam analisis pertumbuhan ekonomi regional komponen *proportional shift* dan *differential shift* lebih penting dibandingkan komponen *regional share* (Soepono, 1993).<sup>49</sup> Jika besaran PS dan DS dinyatakan dalam bidang datar, akan diperoleh 4 kategori posisi relatif dari seluruh daerah atau sektor ekonomi tersebut (Freddy, 2001 sebagaimana dikutip oleh Muta'ali, 2015).<sup>50</sup> Posisi relatif suatu sektor berdasarkan pendekatan PS dan DS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Tipe Pertumbuhan Berdasarkan PS dan DS

Differential Shift (DS)	Proportional Shift (PS)	
	Positif (+)	Negatif (-)
Positif (+)	Tipe I Pertumbuhan Pesat ( <i>Fast Growing</i> )	Tipe II Cenderung Berpotensi ( <i>Highly Potential</i> )
Negatif (-)	Tipe III Berkembang ( <i>Developing</i> )	Tipe IV Terbelakang ( <i>Depressed</i> )

Sumber: Freddy, 2001 dalam Muta'ali, 2015<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Soepono, Prasetyo, 1993. "Analisis Shift Share: Perkembangan dan Penerapan". Dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBI), Vol. 3 No. 1, Hal. 43-54.

<sup>50</sup> Muta'ali, Lutfi, 2015. Teknik Analisis Regional: Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

<sup>51</sup> ibid

### 3. Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha atau komoditi unggulan di suatu daerah. Analisis Tipologi Klasen menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (*developed sector*) (Kuadran I).

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s) dan memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan  $si > s$  dan  $ski > sk$ .

2. Sektor maju tapi tertekan (*stagnant sector*) (Kuadran II).

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s), tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan  $si < s$  dan  $ski > sk$ .

3. Sektor potensial atau masih dapat berkembang (*developing sector*) (Kuadran III).

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s), tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan  $si > s$  dan  $ski < sk$ .

4. Sektor relatif tertinggal (*underdeveloped sector*) (Kuadran IV).

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s) dan sekaligus memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan  $si < s$  dan  $ski < sk$ .

Tabel Klasifikasi Sektor PDRB menurut Analisis Tipologi Klasen

<b>Kuadran I</b> Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat ( <i>developed sektor</i> ) $si > s$ dan $ski > sk$	<b>Kuadran II</b> Sektor maju tapi tertekan ( <i>stagnan sektor</i> ) $si < s$ dan $ski > sk$
<b>Kuadran III</b> Sektor potensial atau masih dapat berkembang ( <i>developing sektor</i> ) $si > s$ dan $ski < sk$	<b>Kuadran IV</b> Sektor relatif tertinggal ( <i>underdeveloped sektor</i> ) $si < s$ dan $ski < sk$

Sumber: Sjafrizal, 2008<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Sjafrizal, 2008. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Padang: Baduouse Media, Cetakan Pertama

<sup>53</sup> ibid

#### 4. Cochran Test

Tes Cochran digunakan untuk mengetahui apakah variabel (kriteria) yang digunakan sesuai dengan subyek yang diteliti (sah/valid). Ketika ditemukan variabel-variabel yang tidak sesuai maka peneliti dapat mengeluarkan variabel tersebut. Dalam metode ini, responden akan diberikan pertanyaan tertutup untuk menilai variabel yang berlawanan yang jawabannya terdiri atas ya atau tidak. Jawaban kemudian dikuantitatif dalam bentuk bilangan biner. Angka 1 untuk jawaban Ya dan 0 untuk jawaban Tidak. Adapun langkah-langkah Cochran Test adalah:

1. Menyusun hipotesis yang akan diuji
2. Menghitung Q hitung dengan menggunakan rumus:

$$Q = \frac{(k-1) \left[ k \sum_{j=1}^k G_j^2 - \left( \sum_{j=1}^k G_j \right)^2 \right]}{k \sum_{i=1}^k L_i - \sum_{i=1}^k L_i^2}$$

dengan :  
 $G_j$  = jumlah keseluruhan skor dalam kolom ke-j  
 $L_i$  = jumlah keseluruhan skor dalam baris ke-i  
 $k$  = banyaknya variabel bebas  
derajat kebebasan : (df = k - 1)

3. Membandingkan Q tabel dengan Q hitung:
  - a. Tolak  $H_0$  dan terima  $H_a$ , jika  $Q_{hit} > Q_{tab}$
  - b. Terima  $H_0$  dan tolak  $H_a$ , jika  $Q_{hit} < Q_{tab}$

Q tabel dengan  $\alpha = 0,05$ , derajat kebebasan (dk) =  $k - 1$  dimana  $k$  = jumlah variabel, maka diperoleh Q tab (0,05; df) dari tabel Chi Square Distribution.<sup>54</sup>
4. Menarik kesimpulan
  - a. Jika  $H_0$  diterima, berarti proporsi jawaban Ya pada semua variabel dianggap sama (semua responden sepakat mengenai semua variabel sebagai faktor yang dipertimbangkan).
  - b. Jika  $H_0$  ditolak berarti belum ada kesepakatan diantara responden tentang variabel. Bila hal ini terjadi, maka akan dilakukan pengujian lagi dengan menghilangkan atau membuang atribut dengan jawaban ya yang paling kecil.<sup>55</sup>

#### 5. Analisis AHP

AHP digunakan untuk menganalisis prioritas produk unggulan di Kabupaten Trenggalek. Metode AHP merupakan metode pengambilan keputusan dengan menggunakan peralatan utama sebuah hierarki. Dengan hierarki, masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dipecah, dikelompokkan, dan diatur menjadi suatu bentuk hierarki. Data utama analisis ini adalah persepsi manusia yang dianggap ahli. Kriteria ahli bukan berarti jenius, pintar, atau bergelar doktor maupun profesor, melainkan lebih mengarah pada orang yang mengerti permasalahan yang dihadapi dalam penelitian.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> [https://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/15\\_Tabel-Kritis.pdf](https://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/15_Tabel-Kritis.pdf)

<sup>55</sup> <http://rosihan.lecture.ub.ac.id/2008/10/cochran-q-test/>

<sup>56</sup> Pou, Hamim, 2023. Belajar Dari Bone Bolango. Mengkaji Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

AHP banyak digunakan pada pengambilan keputusan dengan beragam kriteria, perencanaan, prediksi, dan alokasi sumber daya, sehingga dianggap sebagai model *multi-objektif-multicriteria-multifactor decisions*.<sup>57</sup> Dalam AHP beberapa prinsip dasar yang harus dipahami, antara lain:

- a) Dekomposisi; setelah mendefinisikan permasalahan, dilakukan dekomposisi, yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsur sekecil-kecilnya;
- b) *Comparative judgement*; membuat penilaian terhadap kepentingan relatif dua elemen pada tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. Hasil penilaian disajikan dalam bentuk *pairwise comparison*;
- c) *Synthesis of priority*; dari setiap matrik *pairwise comparison vektor eigen* untuk mendapatkan prioritas lokal. Karena matrik *pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat, maka untuk melakukan secara komprehensif, sintesis* diantara prioritas lokal harus dilakukan. Prosedur melakukan sintesis berbeda menurut bentuk hierarki;
- d) *Logical consistency*; konsistensi memiliki dua makna. Pertama, obyek-obyek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai keseragaman dan relevansinya. Kedua adalah tingkat hubungan antara obyek-obyek yang didasarkan pada kriteria tertentu. AHP menggunakan skala Saaty mulai dari bobot 1 sampai 9. Nilai bobot 1 artinya “sama penting” sedangkan nilai bobot 9 artinya “penting absolut.”

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Sektor Unggulan

#### Struktur Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memberikan banyak manfaat bagi suatu daerah. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut untuk menggali potensi yang dimiliki dan harus mampu merumuskan kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Salah satu kebijakan utama yang perlu untuk dirumuskan adalah kebijakan dalam menentukan sektor perekonomian sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Terlebih pembangunan ditekankan pada sektor yang menyumbang kontribusi besar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Adapun di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Trenggalek terdapat 17 (tujuh belas) sektor perekonomian. Masing-masing sektor tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam menentukan perekonomian. Kontribusi PDRB ADHK dapat bervariasi pun dapat berbeda setiap tahunnya. Kontribusi PDRB ADHK Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Kontribusi PDRB ADHK Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022 (persen)

No	Sektor	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,48	10,06	10,40	10,22	9,88
2	Pertambangan dan Penggalian	5,28	5,08	5,02	4,63	4,09

<sup>57</sup> ibid

No	Sektor	2018	2019	2020	2021	2022
<b>3</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>29,86</b>	<b>30,23</b>	<b>30,31</b>	<b>30,25</b>	<b>47,59</b>
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,29	0,28	0,28	0,28	0,29
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,11	0,10
6	Konstruksi	9,28	9,32	9,23	9,13	9,22
<b>7</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	<b>24,95</b>	<b>18,63</b>	<b>17,98</b>	<b>18,71</b>	<b>18,98</b>
8	Transportasi dan Pergudangan	2,99	2,94	2,70	2,67	3,03
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,45	5,56	5,18	5,16	5,36
10	Informasi dan Komunikasi	5,78	5,88	6,62	6,83	6,78
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,55	2,51	2,57	2,52	2,45
12	Real Estate	1,72	1,72	1,83	1,81	1,80
13	Jasa Perusahaan	0,79	0,80	0,76	0,75	0,75
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,16	2,12	2,16	2,09	1,99
15	Jasa Pendidikan	2,62	2,67	2,84	2,77	2,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,67	0,68	0,76	0,77	0,75
17	Jasa lainnya	1,42	1,43	1,27	1,29	1,38

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi yang paling besar dari 17 (tujuh belas) sektor yang ada di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 47,59 persen atau hampir mencapai 50 persen dari total keseluruhan sektor. Meskipun pada tahun 2018-2021 kontribusi sektor Industri Pengolahan cukup stabil, namun pada tahun 2022 tumbuh secara signifikan. Kontribusi terbesar kedua yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi sebesar 18,98 persen meskipun kontribusi sektor ini mengalami penurunan dari yang awalnya sebesar 24,95 persen pada tahun 2018. Kontribusi sektor terbesar ketiga yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 9,88 persen yang mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Sektor yang kontribusinya mengalami penurunan setiap tahun yaitu sektor pertambangan dan penggalan. Adapun sektor-sektor lainnya seperti Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan

dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa lainnya mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif setiap tahunnya.

Serupa dengan Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Trenggalek, kontribusi PDRB ADHK tidak jauh berbeda jika dilihat dari sektornya yang mendominasi kontribusi nilai tertinggi. Kontribusi PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Kontribusi PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022 (persen)

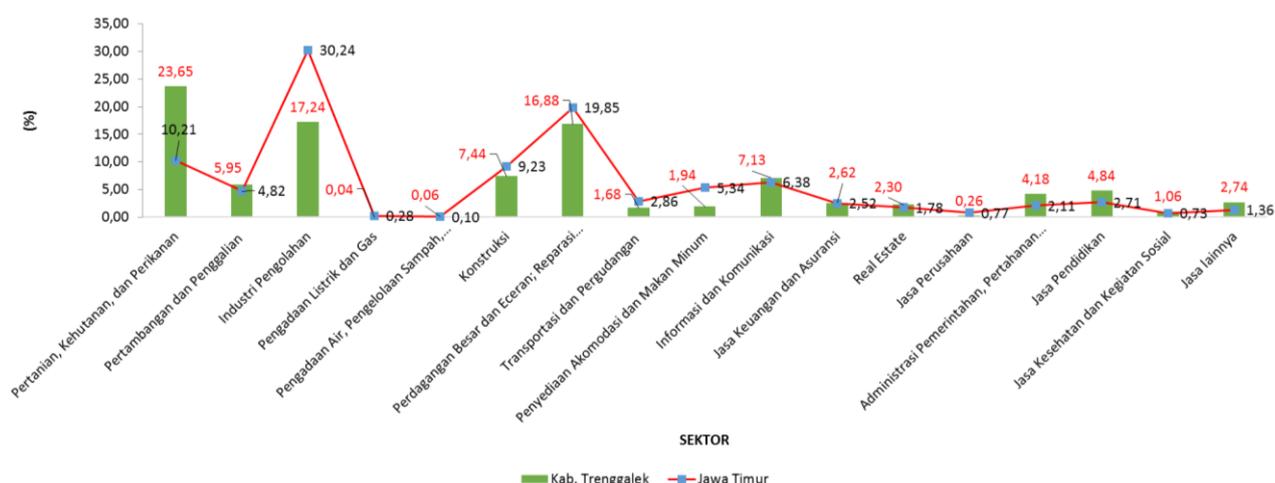
No	Sektor	2018	2019	2020	2021	2022
1	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>24,87</b>	<b>23,78</b>	<b>24,33</b>	<b>23,30</b>	<b>21,97</b>
2	Pertambangan dan Penggalian	6,29	6,06	5,82	5,69	5,87
3	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>15,83</b>	<b>16,46</b>	<b>17,24</b>	<b>18,15</b>	<b>18,55</b>
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
6	Konstruksi	7,65	7,75	7,34	7,10	7,34
7	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	<b>17,23</b>	<b>17,37</b>	<b>16,08</b>	<b>16,67</b>	<b>17,05</b>
8	Transportasi dan Pergudangan	1,57	1,65	1,59	1,68	1,88
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,98	2,02	1,89	1,86	1,94
10	Informasi dan Komunikasi	6,51	6,68	7,36	7,50	7,60
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,64	2,63	2,68	2,61	2,53
12	Real Estate	2,21	2,23	2,36	2,34	2,35
13	Jasa Perusahaan	0,26	0,27	0,25	0,25	0,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,32	4,28	4,25	4,11	3,96
15	Jasa Pendidikan	4,68	4,78	5,03	4,93	4,78
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,96	1,00	1,11	1,13	1,11
17	Jasa lainnya	2,90	2,95	2,55	2,55	2,72

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek, 2023

Berdasarkan tabel di atas, meskipun sektor-sektor di Kabupaten Trenggalek yang mendominasi nilai tertinggi dengan Provinsi Jawa Timur sama, namun urutan kontribusinya berbeda. Berbeda dengan Provinsi Jawa Timur, Kontribusi PDRB ADHK di Kabupaten Trenggalek yang memberikan kontribusi tertinggi pertama yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 21,97 persen dari seluruh total 17 (tujuh belas) sektor. Hal ini dikarenakan lahan pertanian, kehutanan dan perairan di Kabupaten Trenggalek cukup luas dan

menjadi mata pencaharian utama masyarakat di Kabupaten Trenggalek sehingga sektor ini memberikan kontribusi yang tinggi. Kontribusi sektor terbesar kedua di Kabupaten Trenggalek yaitu Industri Pengolahan dengan nilai kontribusi sebesar 18,55 persen yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kontribusi sektor terbesar ketiga yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai kontribusi sebesar 17,05 persen.

Adapun sektor-sektor yang mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif diantaranya adalah sektor Pertambangan dan Penggalian; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. Adapun sektor yang mengalami kenaikan dari tahun 2018-2022 adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Sedangkan untuk sektor Pengadaan Listrik dan Gas selama kurun waktu tahun 2018-2022 memberikan kontribusi sebesar 0,04 persen dan merupakan sektor yang memiliki kontribusi paling kecil. Adapun sektor yang mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2018-2022 adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.



Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek, 2023  
 Gambar Rata-Rata Kontribusi Sektoral Kabupaten Trenggalek

Selain dilihat dari kontribusinya pada masing-masing sektor, berikut merupakan capaian PDRB ADHK Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022.

Tabel PDRB ADHK Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022 (juta rupiah)

NO	Sektor	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	163.799.940.000	165.951.230.000	167.631.240.000	170.592.650.000	173.638.400.000
2	Pertambangan dan Penggalian	82.573.560.000	83.847.020.000	80.897.970.000	77.270.040.000	71.833.630.000
3	Industri Pengolahan	466.908.040.000	498.740.300.000	488.376.560.000	504.855.130.000	536.542.740.000
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.499.000.000	4.561.030.000	4.451.890.000	4.711.100.000	5.065.180.000
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	1.515.430.000	1.586.730.000	1.666.530.000	1.761.000.000	1.800.780.000

NO	Sektor	2018	2019	2020	2021	2022
	Limbah dan Daur Ulang					
6	Konstruksi	145.140.200.000	153.689.590.000	148.652.440.000	152.417.900.000	162.018.820.000
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	390.136.300.000	307.440.920.000	289.656.360.000	312.154.690.000	333.594.780.000
8	Transportasi dan Pergudangan	46.712.450.000	48.471.400.000	43.466.260.000	44.547.870.000	53.222.660.000
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85.237.500.000	91.659.390.000	83.548.620.000	86.108.360.000	94.152.210.000
10	Informasi dan Komunikasi	90.416.220.000	97.070.640.000	106.612.550.000	113.956.930.000	119.114.060.000
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	39.859.900.000	41.374.530.000	41.449.260.000	42.118.040.000	43.096.150.000
12	Real Estate	26.823.050.000	28.441.500.000	29.565.690.000	30.241.300.000	31.618.650.000
13	Jasa Perusahaan	12.308.510.000	13.128.020.000	12.180.020.000	12.466.400.000	13.112.650.000
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	33.730.190.000	34.984.340.000	34.848.510.000	34.948.540.000	35.038.580.000
15	Jasa Pendidikan	41.036.230.000	44.018.960.000	45.760.000.000	46.185.090.000	46.578.620.000
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.485.660.000	11.277.800.000	12.239.460.000	12.847.310.000	13.143.410.000
17	Jasa lainnya	22.259.620.000	23.652.240.000	20.389.190.000	21.567.090.000	24.250.110.000
	<b>PDRB ADHK</b>	<b>1.563.441.820.000</b>	<b>1.649.895.640.000</b>	<b>1.611.392.550.000</b>	<b>1.668.749.440.000</b>	<b>1.757.821.430.000</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Berdasarkan tabel di atas, PDRB ADHK Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 tercapai sebesar 1.757.821.430.000 yang berarti mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Sektor yang menyumbang PDRB tertinggi yaitu sektor Industri Pengolahan sebesar 536.542.740.000. Sedangkan sektor yang menyumbang PDRB terendah dengan capaian sebesar 1.800.780.000 adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Sedangkan capaian masing-masing sektor di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022 (juta rupiah)

NO	Sektor	2018	2019	2020	2021 *	2022 **
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.024.719,30	3.039.096,92	3.042.010,94	3.020.035,43	2.975.958,20
2	Pertambangan dan Penggalian	764.773,50	774.844,14	727.139,38	737.034,19	795.147,10
3	Industri Pengolahan	1.924.941,60	2.103.698,44	2.155.010,07	2.351.544,58	2.512.940,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.142,00	5.498,17	5.533,47	5.690,89	6.093,30
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.374,20	7.764,52	8.149,47	8.698,84	9.195,90
6	Konstruksi	930.594,40	989.897,23	918.126,02	920.363,36	994.131,60

NO	Sektor	2018	2019	2020	2021 *	2022 **
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.095.490,20	2.219.967,24	2.010.830,85	2.160.870,73	2.308.954,00
8	Transportasi dan Pergudangan	191.447,40	210.415,44	199.068,96	217.938,09	254.829,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	240.296,40	258.222,86	236.081,17	241.642,22	263.352,40
10	Informasi dan Komunikasi	791.970,90	853.079,61	919.657,87	971.682,46	1.029.079,40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	320.789,10	336.061,19	334.749,01	337.865,72	342.309,40
12	Real Estate	269.019,00	285.395,60	295.245,68	303.526,76	318.542,90
13	Jasa Perusahaan	31.752,20	33.976,69	31.726,46	32.451,05	34.229,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	525.618,40	546.354,23	531.895,69	532.770,45	535.751,00
15	Jasa Pendidikan	568.635,40	611.431,47	629.240,05	639.389,48	646.988,70
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	116.200,00	127.162,67	138.509,59	146.420,63	149.975,20
17	Jasa lainnya	353.094,20	376.588,54	319.410,37	331.093,60	367.929,40
<b>PDRB ADHK</b>		<b>12.161.858,20</b>	<b>12.779.454,95</b>	<b>12.502.385,05</b>	<b>12.959.018,50</b>	<b>13.545.406,90</b>

Sumber : BPS Kabupaten Trenggalek, 2023

Catatan : \* Data Sementara/Preliminary Figure;

\*\* Data Sangat Sementara/ Very Preliminary Figure

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 sebesar 13.545.406 yang menunjukkan kenaikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan 17 (tujuh belas) sektor PDRB di Kabupaten Trenggalek, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menyumbang PDRB tertinggi yaitu sebesar 2.975.958,20, disusul kemudian dengan sektor industri pengolahan sebesar 2.975.958,20 dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2.308.954,00. Adapun sektor dengan nilai PDRB terkecil adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6.093,30. Apabila dibandingkan dengan PDRB Provinsi Jawa Timur, capaian PDRB Kabupaten Trenggalek jauh lebih kecil, oleh karena itu diperlukan strategi lebih lanjut agar nantinya perekonomian Kabupaten Trenggalek dapat berkontribusi lebih.

### Sektor Basis dan Non Basis

Berdasarkan data PDRB ADHK Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Trenggalek sebelumnya, selanjutnya dilakukan identifikasi sektor ekonomi di Kabupaten Trenggalek yang termasuk sektor basis dan non basis ekonomi melalui analisis *Location Quotion* (LQ). Terdapat 8 (delapan) sektor basis atau unggulan dalam perekonomian Kabupaten Trenggalek dengan nilai rata-rata LQ > 1. Adapun ke-8 (delapan) sektor tersebut dengan LQ yang berurutan yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor Jasa Lainnya; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; sektor Jasa Pendidikan; sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya; sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Real Estate; dan sektor Informasi dan Komunikasi. Kedelapan sektor tersebut dapat diartikan telah memenuhi di Kabupaten Trenggalek sendiri maupun juga memiliki potensi ekspor ke daerah-daerah lain.

Tabel Rata-Rata Nilai *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Trenggalek

No	Sektor	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,30	2,28	2,26	2,20	2,13	2,23	basis
2	Pertambangan dan Penggalian	1,15	1,15	1,12	1,19	1,38	1,26	basis
3	Industri Pengolahan	0,51	0,52	0,55	0,58	0,37	0,49	non basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13	non basis
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,61	0,61	0,61	0,61	0,64	0,60	non basis
6	Konstruksi	0,80	0,80	0,77	0,75	0,76	0,79	non basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,67	0,90	0,86	0,86	0,86	0,88	non basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0,51	0,54	0,57	0,61	0,60	0,51	non basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	non basis
10	Informasi dan Komunikasi	1,09	1,09	1,07	1,06	1,07	1,06	basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,00	1,01	1,00	1,00	0,99	1,00	non basis
12	Real Estate	1,25	1,25	1,24	1,25	1,25	1,22	basis
13	Jasa Perusahaan	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	non basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,94	1,94	1,90	1,90	1,90	1,91	basis
15	Jasa Pendidikan	1,72	1,73	1,71	1,72	1,73	1,76	basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,38	1,40	1,41	1,42	1,42	1,37	basis
17	Jasa lainnya	1,97	1,98	1,95	1,91	1,89	1,92	basis

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek, 2023 (diolah)

### Analisis shift share

*Shift Share* merupakan metode untuk mengukur laju pertumbuhan dan daya saing suatu wilayah. Melalui metode ini, suatu sektor ekonomi dapat diukur cepat atau lambatnya tingkat pertumbuhan suatu wilayah, termasuk sektornya yang menjadi penyumbang daya saing suatu wilayah terhadap wilayah lain. Analisis *Shift Share* Kabupaten Trenggalek dilakukan dengan menghitung pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek dari sisi eksternal.

Tabel Analisis *Shift Share*

No	Sektor	PS	DS	Tipe
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-94049,4	18198,8	2
2	Pertambangan dan Penggalian	-1382,7	-17491,0	4
3	Industri Pengolahan	2841,7	14756,8	1

No	Sektor	PS	DS	Tipe
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-270,7	221,6	2
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-83,2	89,2	2
6	Konstruksi	2691,8	2968,3	1
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12587,9	-11444,7	3
8	Transportasi dan Pergudangan	1797,7	1976,6	1
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3830,5	998,8	1
10	Informasi dan Komunikasi	15105,4	8407,7	1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4377,8	-99,4	3
12	Real Estate	1151,5	1356,5	1
13	Jasa Perusahaan	31,2	227,8	1
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-12813,9	2206,7	2
15	Jasa Pendidikan	2205,3	2678,7	1
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2641,3	596,1	1
17	Jasa lainnya	-3948,4	2924,7	2

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek, 2023 (diolah)

Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 9 (sembilan) sektor yang berada pada Tipe I atau sektor dengan pertumbuhan cepat dan berdaya saing, yaitu sektor Industri Pengolahan; sektor Konstruksi; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; sektor Informasi dan Komunikasi; sektor Real Estate; sektor Jasa Perusahaan; sektor Jasa Pendidikan; dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Adapun sektor yang cenderung berpotensi dengan pertumbuhannya lambat namun memiliki daya saing yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Pengadaan Listrik dan Gas; sektor Pengadaan Air, sektor Pengelolaan Sampah, sektor Limbah dan Daur Ulang; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan sektor Jasa lainnya.

Sektor yang termasuk pada Tipe IV atau terbelakang yaitu sektor Pertambangan dan Pengecambahan. Sedangkan 2 (dua) sektor termasuk berkembang yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; dan sektor Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Adapun klasifikasi masing-masing kuadran dapat dilihat pada gambar berikut:

<p><b>Tipe I</b>  <b>Sektor dengan Pertumbuhan Cepat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri Pengolahan</li> <li>2. Konstruksi</li> <li>3. Transportasi dan Pergudangan</li> <li>4. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</li> <li>5. Informasi dan Komunikasi</li> <li>6. Real Estate</li> <li>7. Jasa Perusahaan</li> <li>8. Jasa Pendidikan</li> <li>9. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</li> </ol>	<p><b>Tipe II</b>  <b>Sektor yang cenderung berpotensi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</li> <li>2. Pengadaan Listrik dan Gas</li> <li>3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</li> <li>4. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</li> <li>5. Jasa lainnya</li> </ol>
--	--

<b>Tipe III</b> <b>Sektor yang berkembang</b> 1. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2. Jasa Keuangan dan Asuransi	<b>Tipe IV</b> <b>Sektor yang terbelakang</b> • Pertambangan dan Penggalian
--	---

Sumber: Penulis, 2023

Gambar Kuadran *Shift Share* Sektor Ekonomi Kabupaten Trenggalek

### Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan pengelompokan suatu sektor, subsektor, usaha atau komoditi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang menjadi acuan dan membandingkan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi suatu daerah dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih tinggi. Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah. Hasil analisis Tipologi Klassen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Analisis Tipologi Klassen

No	Sektor	Rata-Rata Kab. Trenggalek		Rata-Rata Prov. Jatim		Kuadran
		Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	
		Si	SKi	S	SK	
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	0,033	0,276	0,026	0,121	K1
2	Informasi dan Komunikasi	0,096	0,059	0,084	0,055	K1
3	<i>Real Estate</i>	0,070	0,021	0,064	0,017	K1
4	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,035	0,045	0,031	0,023	K1
5	Jasa Pendidikan	0,069	0,045	0,064	0,026	K1
6	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,093	0,009	0,087	0,006	K1
7	Jasa Lainnya	0,054	0,029	0,045	0,015	K1
8	Pertambangan dan Penggalian	0,030	0,066	0,055	0,052	K2
9	Perdagangan Besar dan Eceran	0,059	0,168	0,066	0,183	K4
10	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,077	0,025	0,077	0,025	K4
11	Industri pengolahan	0,068	0,145	0,060	0,293	K3
12	Pengadaan listrik dan gas	0,046	0,000	0,001	0,003	K3
13	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,057	0,001	0,044	0,001	K3
14	Konstruksi	0,066	0,074	0,062	0,091	K3
15	Transportasi dan Pergudangan	0,082	0,014	0,071	0,029	K3

No	Sektor	Rata-Rata Kab. Trenggalek		Rata-Rata Prov. Jatim		Kuadran
		Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	
		Si	SKi	S	SK	
16	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,081	0,018	0,077	0,051	K3
17	Jasa Perusahaan	0,067	0,002	0,059	0,008	K3

Sumber: Penulis, 2023

Berdasarkan penghitungan dengan tipologi Klassen di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 sektor yang termasuk pada Kuadran I atau sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat, yaitu sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor informasi dan komunikasi; sektor *real estate*; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan sektor jasa lainnya. Adapun sektor yang termasuk pada Kuadran II atau sektor maju tapi tertekan yaitu sektor Pertambangan dan penggalian. Sektor yang termasuk pada Kuadran III atau sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat yaitu Sektor Industri; sektor Pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor konstruksi; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor jasa perusahaan. Sedangkan sektor yang termasuk kuadran IV aatau relatif tertinggal adalah sektor perdagangan besar dan eceran; dan sektor jasa keuangan dan asuransi.

<p><b>Kuadran I</b>  <b>Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (<i>developed sector</i>)</b>            1. Pertanian, kehutanan dan perikanan            2. Informasi dan Komunikasi            3. Real Estate            4. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib            5. Jasa Pendidikan            6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial            7. Jasa Lainnya</p>	<p><b>Kuadran II</b>  <b>Sektor maju tapi tertekan (<i>stagnan sector</i>)</b>            Pertambangan dan Penggalian</p>
<p><b>Kuadran III</b>  <b>Sektor potensial atau masih dapat berkembang (<i>developing sector</i>)</b>            1. Industri pengolahan            2. Pengadaan listrik dan gas            3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang            4. Konstruksi            5. Transportasi dan Pergudangan            6. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum            7. Jasa Perusahaan</p>	<p><b>Kuadran IV</b>  <b>Sektor relatif tertinggal (<i>underdeveloped sector</i>)</b>            1. Perdagangan Besar dan Eceran            2. Jasa keuangan dan Asuransi</p>

Gambar Kuadran Tipologi Klassen  
 Sumber: Penulis, 2023

## 2. Penentuan Kriteria Produk Unggulan Daerah

Penentuan kriteria produk unggulan daerah didasarkan pada beberapa kriteria yang ada pada penelitian terdahulu dan regulasi yang masih relevan (berlaku). Dalam proses tersebut, unsur pentahelix di Kabupaten Trenggalek dilibatkan. Pelibatan tersebut dalam upaya untuk mencapai kesepakatan terlebih dahulu sebelum menyusun perencanaan, melaksanakan rencana, serta melakukan monitoring dan evaluasi program pengembangan produk unggulan daerah nantinya. Adapun hasil sintesis dari tinjauan literatur dan regulasi, maka kriteria yang digunakan untuk menentukan produk unggulan daerah Kabupaten Trenggalek adalah:

Tabel Kriteria Produk Unggulan Daerah Berdasarkan Tinjauan Literatur

Sandrina (2015)	Pradigda (2016)	Yufit, et., al., (2017)	Permendagri No.9 tahun 2014	Sintesis	Kode
Sumbangan ekonomi	Sumbangan terhadap perekonomian	Pertumbuhan nilai tambah	Sumbangan ekonomi	Sumbangan ekonomi	K1
Kondisi input	Kondisi input (SDM)	Penyerapan tenaga kerja	Penyerapan tenaga kerja Sosial budaya	Tenaga kerja	K2
Tingkat daya saing Keunikan produk	Daya saing Produk unik/khas daerah		Sektor basis ekonomi daerah	Sektor basis dan berdaya saing	K3
Dampak lingkungan	Dampak terhadap lingkungan	Konservasi lingkungan	Dapat diperbaharui	Ramah lingkungan	K4
Pasar	Pasar	Jangkauan pemasaran Volume ekspor	Ketersediaan pasar	Pasar	K5
		Volume impor bahan baku	Bahan baku	Bahan baku	K6
Kemitraan	Kemitraan	Keterkaitan antar sektor		Keterkaitan antar sektor	K7
Kebijakan lembaga	Dukungan kebijakan dan kelembagaan			Dukungan kebijakan	K8
	Kondisi input (infrastruktur, teknologi) Kondisi input (modal)		Sarana dan prasarana produksi Teknologi Modal	Dukungan infrastruktur, sarana, prasarana, teknologi, modal	K9
			Manajemen usaha		
			Harga		

Sumber: Penulis, 2023

Kriteria tersebut belum langsung digunakan dasar untuk menentukan produk unggulan daerah di Kabupaten Trenggalek. Masih diperlukan proses analisis yaitu proses penyepakatan dan penentuan bobot setiap kriteria oleh stakeholder. Proses penyepakatan menggunakan analisis Cochran Test, sedangkan penentuan bobot menggunakan analisis AHP.

Penentuan kriteria produk unggulan daerah Kabupaten Trenggalek mengacu pada hasil analisis cochran dari 13 responden yang dianggap sebagai stakeholder kunci dalam

mengembangkan produk unggulan daerah. Responden tersebut adalah perwakilan pemerintah, perwakilan swasta, perwakilan media massa, perwakilan komunitas, dan perwakilan akademisi. Setiap responden diminta mengisi kuesioner tertutup terhadap setiap kriteria. Ketika responden setuju diberikan angka 1 dan jika tidak setuju diberikan angka 0 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel Jawaban Responden Untuk Uji Cochran

No	Responden	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Li	Li <sup>2</sup>
1	Pemerintah (BPS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	81
2	Pemerintah (Komidag)	1	1	1	1	1	0	1	1	0	7	49
3	Pemerintah (Perinaker)	1	1	1	1	1	1	0	1	0	7	49
4	Pemerintah (Pertanian)	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	64
5	Pemerintah (Perikanan)	1	1	1	1	1	1	0	0	1	7	49
6	Pemerintah (Pariwisata)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	81
7	Pemerintah (Peternakan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	81
8	Pemerintah (Bappeda)	1	1	1	0	1	1	0	1	0	6	36
9	Pemerintah (PMPTSP)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	81
10	Media Lokal (Kabar Trenggalek)	1	1	0	1	1	1	1	1	1	8	64
11	Asosiasi UMKM	1	1	1	1	1	0	1	1	0	7	49
12	Trenggalek Creative Network	1	1	0	1	1	1	1	0	1	7	49
13	Universitas Brawijaya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	81
	Jumlah	13	13	11	12	13	11	10	11	8	102	814

Sumber: Penulis, 2023 Ket: Li = total baris, Li<sup>2</sup> = total baris kuadrat 1=setuju, 0= tidak setuju

Uji Cochran menggunakan hipotesis Ho diterima jika  $Q_{hit} < Q_{tabel}$ . Jika Ho diterima maka semua responden dianggap sepakat bahwa semua kriteria merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan produk unggulan daerah Kabupaten Trenggalek. Uji ini menggunakan taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan ( $df=k-1$ ) atau ( $9-1=8$ ). Berdasarkan tabel *chisquare*, didapatkan nilai Q tabel = 15,507. Adapun perhitungan Q hitung adalah:

$$Q = \frac{(k-1) \left[ k \sum_{j=1}^k G_j^2 - \left( \sum_{j=1}^k G_j \right)^2 \right]}{k \sum_{i=1}^k L_i - \sum_{i=1}^k L_i^2} = \frac{8 \times ((9 \times 1178) - 10.404)}{(9 \times 102) - 814} = 15,231$$

Berdasarkan perhitungan, didapatkan Q hitung = 15,231 lebih kecil daripada Q tabel = 15,507 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua kriteria (jumlah = 9 kriteria) sepakat digunakan sebagai kriteria penentu produk unggulan daerah di Kabupaten Trenggalek.

### 3. Prioritas Produk Unggulan Daerah

Pembangunan daerah yang memfokuskan pada sektor unggulan menjadi *mainstream* bagi daerah yang masih mengandalkan potensi alam yang dimiliki khususnya di daerah pedesaan. Kabupaten Trenggalek sendiri memiliki kemiripan potensi ekonomi dengan kabupaten sekitar seperti Tulungagung, Ponorogo, Pacitan, Blitar, dan Malang. Penelitian Yufit, et., al., 2017; Sandrina, et., al., 2015; dan Pradigda, 2016 menyimpulkan bahwa pembangunan daerah memang harus fokus pada produk yang menjadi potensi daerah. Menurut Yufit, Kabupaten Pacitan, Ponorogo, dan Magetan memiliki potensi produk olahan janggolan; produk kerajinan kulit, anyaman bambu; batu mulia; dan batik. Sedangkan Sandrina, menyimpulkan bahwa Kabupaten Malang harus fokus pada pengembangan produk industri makanan tempe dan keripik dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Lebih lanjut, Pradigda menemukan bahwa Kabupaten Blitar memiliki produk kerajinan tempurung kelapa yang memiliki daya saing yang tinggi. Karagaman dan spesialisasi memang mutlak diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Spesialisasi memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa serta mengurangi persaingan ekonomi antar daerah.

Setelah mengetahui sektor unggulan yang menjadi prioritas pembangunan jangka pendek menengah, dan panjang, tahap selanjutnya adalah menentukan prioritas produk unggulan daerah. Penentuan prioritas produk unggulan daerah menggunakan kriteria yang telah diuji sebelumnya menggunakan Cochran dengan 9 kriteria yang disepakati. Selanjutnya, dilakukan identifikasi produk-produk unggulan yang akan menjadi alternatif pilihan dalam AHP.

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah menentukan prioritas produk unggulan daerah Kabupaten Trenggalek berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disepakati oleh stakeholder pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media massa. Adapun susunan hierarki AHP dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hierarki I : Tujuan yang ingin dicapai yaitu: Penentuan Produk Unggulan Daerah

Hierarki II : Kriteria-kriteria yang digunakan dalam menentukan produk unggulan daerah

- a. Sumbangan terhadap ekonomi daerah
- b. Penyerapan tenaga kerja
- c. Sektor basis dan memiliki daya saing tinggi
- d. Ramah lingkungan
- e. Ketersediaan pasar
- f. Ketersediaan bahan baku
- g. Keterkaitan dengan sektor lainnya
- h. Dukungan pemerintah
- i. Kondisi input (infrastruktur, sarpras, teknologi, modal)

Hierarki III : Alternatif produk unggulan daerah

1. Perikanan
2. Perkebunan
3. Kehutanan
4. Biofarmaka
5. Peternakan
6. Buah-buahan
7. Sayur-sayuran
8. Fesyen
9. Pertambangan
10. Tanaman pangan
11. Pariwisata
12. Kuliner
13. Kriya

### 3.1. Hasil pembobotan kriteria

Berdasarkan hasil perhitungan bobot kepentingan masing-masing kriteria, maka urutan kriteria yang mempengaruhi pemilihan produk unggulan daerah menurut pendapat pakar dari masing-masing kelompok/ aktor sebagai berikut:

Tabel Hasil AHP Perbandingan Kriteria dari Aktor Akademisi

Kriteria	Label	Bobot	Ranking
K9	Kondisi input (infrastruktur, sarpras, teknologi, modal)	30,1	1
K8	Dukungan pemerintah	21,7	2
K5	Pasar	15,8	3
K3	Sektor basis dan memiliki daya saing tinggi	11,3	4
K1	Sumbangan ekonomi	7,6	5
K2	Penyerapan tenaga kerja	5,1	6
K6	Bahan baku	3,7	7
K7	Keterlibatan dengan sektor lainnya	2,7	8
K4	Ramah lingkungan	2	9

Consistency Ratio (CR) = 0,02

Sumber: Hasil AHP dengan Expert Choice, 2023

Tabel Hasil AHP Perbandingan Kriteria dari Aktor Swasta

Kriteria	Label	Bobot	Ranking
K6	Ketersediaan bahan baku	27,3	1
K1	Sumbangan terhadap ekonomi daerah	22	2
K8	Dukungan pemerintah	15,3	3
K2	Penyerapan tenaga kerja	11,1	4
K3	Sektor basis dan memiliki daya saing tinggi	7,8	5
K5	Ketersediaan pasar	7,8	6

Kriteria	Label	Bobot	Ranking
K7	Keterkaitan dengan sektor lainnya	3,8	7
K9	Kondisi input (infrastruktur, sarpras, teknologi, modal)	2,9	8
K4	Ramah lingkungan	2	9

Consistency Ratio (CR) = 0,06

Sumber: Hasil AHP dengan Expert Choice, 2023

Tabel Hasil AHP Perbandingan Kriteria dari Aktor Komunitas

Kriteria	Label	Bobot	Ranking
K1	Sumbangan terhadap ekonomi daerah	30,4	1
K4	Ramah lingkungan	21,9	2
K5	Ketersediaan pasar	15,8	3
K6	Ketersediaan bahan baku	10,8	4
K2	Penyerapan tenaga kerja	7,6	5
K7	Keterkaitan dengan sektor lainnya	5	6
K9	Kondisi input (infrastruktur, sarpras, teknologi, modal)	3,8	7
K3	Sektor basis dan memiliki daya saing tinggi	2,7	8
K8	Dukungan Pemerintah	2	9

Consistency Ratio (CR) = 0,02

Sumber: Hasil AHP dengan Expert Choice, 2023

Tabel Hasil AHP Perbandingan Kriteria dari Aktor Pemerintah

Kriteria	Label	Bobot	Ranking
K6	Ketersediaan bahan baku	20,9	1
K1	Sumbangan terhadap ekonomi daerah	18,2	2
K2	Penyerapan tenaga kerja	17,1	3
K5	Ketersediaan pasar	15,7	4
K3	Sektor basis dan memiliki daya saing tinggi	10,8	5
K4	Ramah lingkungan	5	6
K8	Dukungan Pemerintah	4,6	7
K7	Keterkaitan dengan sektor lainnya	4,1	8
K9	Kondisi input (infrastruktur, sarpras, teknologi, modal)	3,6	9

Consistency Ratio (CR) = 0,00

Sumber: Hasil AHP dengan Expert Choice, 2023

Tabel Hasil AHP Perbandingan Kriteria dari Aktor Media Massa

Kriteria	Label	Bobot	Ranking
K4	Ramah lingkungan	30,1	1
K5	Ketersediaan pasar	21,7	2
K8	Dukungan Pemerintah	15,8	3
K2	Penyerapan tenaga kerja	11,3	4
K9	Kondisi input (infrastruktur, sarpras, teknologi, modal)	7,6	5
K6	Ketersediaan bahan baku	5,1	6

Kriteria	Label	Bobot	Ranking
K1	Sumbangan terhadap ekonomi daerah	3,7	7
K7	Keterkaitan dengan sektor lainnya	2,7	8
K3	Sektor basis dan memiliki daya saing tinggi	2	9

Consistency Ratio (CR) = 0,02

Sumber: Hasil AHP dengan Expert Choice, 2023

Secara keseluruhan, menurut pendapat gabungan aktor pakar (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media massa) dalam rangka penentuan kriteria produk unggulan daerah di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Hasil AHP Perbandingan Kriteria Gabungan (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media Massa)

Kriteria	Label	Bobot	Ranking
K1	Sumbangan terhadap ekonomi daerah	17,9	1
K6	Ketersediaan bahan baku	17,9	2
K5	Ketersediaan pasar	17,2	3
K2	Penyerapan tenaga kerja	15,6	4
K3	Sektor basis dan memiliki daya saing tinggi	9,2	5
K8	Dukungan Pemerintah	6,6	6
K4	Ramah lingkungan	6,3	7
K9	Kondisi Input (infrastruktur, sarpras, teknologi, modal)	5	8
K7	Keterkaitan dengan sektor lainnya	4,3	9

Consistency Ratio (CR) = 0,00

Sumber: Hasil AHP dengan Expert Choice, 2023

Berdasarkan hasil *combine* (gabungan) antara persepsi aktor, maka kriteria produk unggulan daerah di Kabupaten Trenggalek yang memiliki bobot terbesar adalah 1) Sumbangan terhadap ekonomi daerah; dan 2) Ketersediaan bahan baku. Keduanya sama-sama memiliki bobot 17,9%. Selanjutnya, kriteria yang menentukan sebuah produk dikatakan unggulan atau tidak adalah Ketersediaan pasar (17,2%, penyerapan tenaga kerja (15,6%), dan merupakan sektor basis yang memiliki daya saing (9,2%). Terakhir kriteria yang dianggap tidak terlalu signifikan sebagai prasyarat produk unggulan daerah adalah dukungan pemerintah, ramah lingkungan, kondisi input, dan keterkaitan dengan sektor lainnya yang secara total hanya memiliki bobot 22,2%. Hal yang cukup menarik dari hasil AHP tersebut adalah peran pemerintah dianggap tidak begitu dibutuhkan dalam penentuan dan pengembangan produk unggulan daerah di Kabupaten Trenggalek. Peran tersebut tercermin dalam kriteria dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan perencanaan serta dukungan terhadap kondisi input seperti infrastruktur, sarana prasarana pendukung, serta adopsi teknologi. Aktor yang menganggap dukungan pemerintah itu sangat penting dalam mengembangkan produk unggulan daerah di Kabupaten Trenggalek adalah akademisi.

Menariknya, aktor pemerintah sendiri menganggap peran mereka perlu dikurangi dalam upaya mengembangkan produk unggulan daerah di Kabupaten Trenggalek.

### 3.2. Hasil pembobotan produk unggulan daerah Kabupaten Trenggalek

Setelah mengetahui bobot kriteria penentuan prioritas produk unggulan daerah di Kabupaten Trenggalek, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan kriteria tersebut untuk menentukan prioritas alternatif produk unggulan daerah. Bobot kriteria akan digunakan untuk menentukan urutan prioritas (peringkat) diantara pilihan terhadap 13 produk/komoditas.

#### 1. Kriteria Sumbangan Terhadap Ekonomi Daerah

Berdasarkan analisis AHP terhadap seluruh stakeholder, menempatkan Sumbangan terhadap Ekonomi Daerah sebagai kriteria utama dalam menetapkan produk unggulan daerah di Kabupaten Trenggalek. Adapun perhitungan kriteria Sumbangan terhadap Ekonomi Daerah terhadap masing-masing produk berdasarkan persepsi seluruh stakeholder sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel Hasil AHP Perbandingan Alternatif Produk terhadap Kriteria Sumbangan Terhadap Ekonomi Daerah

No	Alternatif Produk	Bobot				
		Pemerintah	Bisnis	Komunitas	Media Massa	Gabungan
1	Perikanan	13,4	17,6	17,8	16	14,8
2	Perkebunan	10,2	11,2	14,1	15,6	11,4
3	Kehutanan	5,9	8,4	5,2	4,5	6,1
4	Biofarmaka	4,3	3,9	6,6	3,6	4,5
5	Peternakan	12,2	3,1	4,1	10,1	10,1
6	Buah-buahan	6	2,3	11,1	14,3	6,5
7	Sayur-sayuran	4,4	1,8	8,6	2,8	4,4
8	Fesyen	2,3	1,2	1,6	2,1	2,2
9	Pertambangan	2,2	1,7	3,1	1,4	2,2
10	Tanaman pangan	21,8	13,5	22,2	14,3	21,1
11	Pariwisata	6	6	1,9	7,8	5,8
12	Kuliner	7,9	17,9	2,4	6	7,7
13	Kriya	3,4	11,3	1,2	1,7	3,3
Consistency Ratio (CR)		0,00	0,09	0,03	0,02	0,00

Sumber: Hasil AHP dengan Expert Choice, 2023

Sumbangan terhadap ekonomi daerah memberikan makna bahwa produk harus memberikan manfaat peningkatan pendapatan masyarakat dan menjadi penyumbang struktur ekonomi di daerah. Menurut stakeholder pemerintah, pelaku bisnis, komunitas kreatif dan media masa, produk yang paling memberikan sumbangan terhadap ekonomi daerah adalah **tanaman pangan, perikanan dan perkebunan**. Dari hasil perhitungan AHP, nilai CR perbandingan alternatif semua dibawah 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa matrik perbandingan berpasangan kombinasi stakeholder sudah konsisten.

Sumbangan terhadap ekonomi merupakan produk yang memiliki nilai ekonomis memberikan manfaat bagi konsumen, memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang, memberi efek berganda ekonomi dan sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan dan

daerah yang memproduksi produk unggulan tersebut (Permendagri Nomor 9 Tahun 2014). Sumbangan terhadap ekonomi pada ujungnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sampai dengan saat ini, pertumbuhan ekonomi masih menjadi indikator keberhasilan pembangunan di suatu wilayah (Huang dan Ho, 2017 dan Smith, 2012).<sup>58</sup> Namun, yang perlu diingat bahwa pembangunan yang terlalu fokus pada Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkatkan ketimpangan dan degradasi lingkungan (Stiglitz, 2010 dalam Khotimah, 2023).<sup>59</sup>

Pengembangan produk unggulan daerah (berbasis desa), terbukti mampu secara signifikan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah di Jawa Timur. Semakin banyak persentase desa dengan produk unggulan daerah maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan sehingga perlu optimalisasi kepemilikan produk unggulan sebagai bagian dari strategi akselerasi pembangunan ekonomi inklusif (Khotimah, 2023).<sup>60</sup> Kabupaten Trenggalek sendiri memiliki 84 desa dari total 157 desa/kelurahan yang memiliki produk unggulan (53%). Namun, hanya 1 desa yang memiliki produk unggulan yang pemasarannya sampai ke luar negeri (ekspor) (BPS, 2021).<sup>61</sup>

## 2. Kriteria Penyerapan Tenaga Kerja

Sejalan dengan kriteria Sumbangan terhadap Ekonomi Daerah, jumlah tenaga kerja yang terserap juga penting menjadi kriteria dalam menentukan produk unggulan daerah. Asumsinya, semakin banyak tenaga kerja yang terlibat, maka semakin besar pula pendapatan yang diterima masyarakat. Adapun perhitungan kriteria Penyerapan Tenaga Kerja terhadap masing-masing produk berdasarkan persepsi seluruh stakeholder sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel Hasil AHP Perbandingan Alternatif Produk terhadap Kriteria Penyerapan Tenaga Kerja

No	Alternatif Produk	Bobot				
		Pemerintah	Bisnis	Komunitas	Media Massa	Gabungan
1	Perikanan	11,7	17,3	17,8	15,5	13,3
2	Perkebunan	10,9	14,3	14,1	15,5	12,2
3	Kehutanan	6,9	11,7	5,2	3,8	6,9
4	Biofarmaka	4	7,5	6,6	2,9	4,4
5	Peternakan	11,3	6,8	4,1	10,7	10,2
6	Buah-buahan	7,8	5,5	11,1	15,5	8,5
7	Sayur-sayuran	5,5	4,4	8,6	4,8	5,7
8	Fesyen	2,2	1,4	1,6	1,7	2,1
9	Pertambangan	1,9	1,6	3,1	1,5	2
10	Tanaman pangan	22,7	21,2	22,2	6,4	21
11	Pariwisata	5	3,2	1,9	8,4	4,8
12	Kuliner	6,7	2,2	2,4	10,9	6
13	Kriya	3,2	3	1,2	2,3	2,9

<sup>58</sup> Huang, C.J., & Ho, Y.H., 2017. Governance and Economic Growth in Asia. The North American Journal of Economic and Finance. Vol. 39. Hal. 260-272. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.najef.2016.10.010>

<sup>59</sup> Khotimah, Dian Rizqi Khusnul, 2023. Inclusive Economy Acceleration: Optimize The Existence and Export Opportunity of Village Based Superior Product. Proceeding the 10<sup>th</sup> East Java Economic Forum.

<sup>60</sup> ibid

<sup>61</sup> BPS, 2021. Statistik potensi desa Provinsi Jawa Timur.

No	Alternatif Produk	Bobot				
		Pemerintah	Bisnis	Komunitas	Media Massa	Gabungan
Consistency Ratio (CR)		0,00	0,06	0,03	0,03	0,00

Sumber: Hasil AHP dengan Expert Choice, 2023

Penyerapan tenaga kerja memberikan makna bahwa produk harus mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Menurut stakeholder pemerintah, pelaku bisnis, komunitas kreatif dan media masa, produk yang paling mampu menyerap tenaga kerja di Kabupaten Trenggalek sama dengan produk yang mampu memberikan sumbangan terhadap ekonomi yaitu adalah **tanaman pangan, perikanan dan perkebunan**. Dari hasil perhitungan AHP, nilai CR perbandingan alternatif semua dibawah 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa matrik perbandingan berpasangan kombinasi stakeholder sudah konsisten.

Pengembangan produk unggulan daerah juga diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja di Kabupaten Trenggalek. Secara struktur ekonomi, Kabupaten Trenggalek didominasi lapangan usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan selama 1 dasawarsa terakhir. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Trenggalek menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, khususnya tanaman pangan sebagai sumber makanan utama. Menurut BPS (2021),<sup>62</sup> secara kewilayahan sampai pada tingkat desa, sejumlah 150 desa masyarakatnya sebagian besar (dominan) bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dua desa masyarakatnya dominan bekerja di sektor industri pengolahan, 4 desa masyarakat dominan bekerja di sektor perdagangan, dan hanya 1 desa yang masyarakat dominan bekerja di sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman.

### 3. Kriteria Sektor Basis dan Berdaya Saing

Produk yang berdaya saing merupakan barang/jasa yang mampu memenuhi kebutuhan lokal (kabupaten) dan luar kabupaten, memiliki keunikan dibandingkan kabupaten lain, harga yang kompetitif, dan kualitas terbaik. Adapun perhitungan kriteria Sektor Basis dan Berdaya Saing terhadap masing-masing produk berdasarkan persepsi seluruh stakeholder sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel Hasil AHP Perbandingan Alternatif Produk terhadap Kriteria Sektor Basis dan Berdaya Saing

No	Alternatif Produk	Bobot				
		Pemerintah	Bisnis	Komunitas	Media Massa	Gabungan
1	Perikanan	16,5	3	3,2	22,5	14,2
2	Perkebunan	9,5	2,4	4,9	2,4	7,8
3	Kehutanan	5,9	2	6,6	5	6
4	Biofarmaka	8,7	6,2	3,5	3,3	7,9
5	Peternakan	8,6	1,7	2,8	8,3	7,6
6	Buah-buahan	8,2	11,3	1,6	13,8	8,5
7	Sayur-sayuran	4,9	8,8	1,2	6,4	5,2

<sup>62</sup> ibid

No	Alternatif Produk	Bobot				
		Pemerintah	Bisnis	Komunitas	Media Massa	Gabungan
8	Fesyen	4,3	14,2	8,5	3,7	5,5
9	Pertambangan	2,8	1,7	17,8	1,4	3,2
10	Tanaman pangan	11,4	13,5	1,9	10,9	11
11	Pariwisata	6,9	4,9	22,8	17,4	8,8
12	Kuliner	5,8	20,9	14,2	2,8	7,3
13	Kriya	6,6	9,4	10,9	2,2	7,1
Consistency Ratio (CR)		0,00	0,08	0,04	0,04	0,00

Sumber: Hasil AHP dengan Expert Choice, 2023

Menurut stakeholder pemerintah, pelaku bisnis, komunitas kreatif dan media masa, produk yang merupakan basis dan memiliki daya saing adalah **perikanan, tanaman pangan, dan pariwisata**. Dari hasil perhitungan AHP, nilai CR perbandingan alternatif semua dibawah 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa matrik perbandingan berpasangan kombinasi stakeholder sudah konsisten.

Kemampuan daerah untuk memproduksi dan memasarkan produknya (barang dan jasa) mencerminkan daya saing suatu daerah. Untuk memenangkan persaingan produk harus memiliki keunikan, keunggulan, dan kebermanfaatannya melalui inovasi. Melalui inovasi, produk akan sulit ditiru dengan kompetitor. Dalam konteks persaingan, daya saing merupakan upaya yang harus terus ditingkatkan oleh pelaku usaha/ekonomi agar tetap eksis dalam menjalankan usahanya. Kenyataannya, di era globalisasi, produk-produk lokal akan bersaing secara bebas dengan produk-produk dari daerah atau negara lain. Menurut Tarigan (2014), globalisasi merupakan tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah terkait dengan ekonomi lokal. Pemerintah daerah harus membangun keunggulan dan perluasan basis ekonomi lokal agar mampu memenangkan persaingan lokal dan global, sehingga perekonomian lokal mampu meraih keuntungan semaksimal mungkin dari globalisasi.

#### 4. Kriteria Ramah Lingkungan

Isu lingkungan menjadi sangat relevan dalam beberapa dasawarsa terakhir. Meskipun pengembangan produk unggulan daerah orientasi utamanya adalah peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, aspek lingkungan harus tetap menjadi perhatian utama. Produk yang dikembangkan juga harus menjamin keberlanjutan lingkungan dimasa mendatang, bukan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sesaat. Adapun perhitungan kriteria Ramah Lingkungan terhadap masing-masing produk berdasarkan persepsi seluruh stakeholder sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel Hasil AHP Perbandingan Alternatif Produk terhadap Kriteria Ramah Lingkungan

No	Alternatif Produk	Bobot				
		Pemerintah	Bisnis	Komunitas	Media Massa	Gabungan
1	Perikanan	6,8	6,8	5,5	6,6	6,9
2	Perkebunan	15,1	5,3	11,6	8,6	13,4

No	Alternatif Produk	Bobot				
		Pemerintah	Bisnis	Komunitas	Media Massa	Gabungan
3	Kehutanan	11,5	4,1	3,4	11	9,4
4	Biofarmaka	8,2	9,4	8,8	5,2	8,4
5	Peternakan	4,7	2,1	4,3	4	4,4
6	Buah-buahan	15	13,8	18,4	22,4	16,3
7	Sayur-sayuran	9,2	11,4	14,2	17,8	10,7
8	Fesyen	3,3	1,7	1,2	1,5	2,8
9	Pertambangan	1,6	1,4	2	1,2	1,6
10	Tanaman pangan	13,4	17,1	18,4	14,1	14,7
11	Pariwisata	4,1	3,1	5,8	3,1	4,1
12	Kuliner	3,2	2,5	3,4	2,4	3,2
13	Kriya	3,8	21,2	2,8	1,9	4,2
Consistency Ratio (CR)		0,00	0,03	0,09	0,03	0,00

Sumber: Hasil AHP dengan Expert Choice, 2023

Menurut stakeholder pemerintah, pelaku bisnis, komunitas kreatif dan media masa, produk yang ramah lingkungan adalah **buah-buahan, tanaman pangan, dan perkebunan**. Dari hasil perhitungan AHP, nilai CR perbandingan alternatif semua dibawah 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa matrik perbandingan berpasangan kombinasi stakeholder sudah konsisten.

*Eco-friendly* merupakan salah satu tren yang berkembang akhir-akhir ini merespon isu perubahan iklim akibat pemanasan global. Kesadaran masyarakat global akan isu lingkungan semakin mengemuka. Masyarakat sebagai konsumen dan investor kini cenderung mendukung produk yang ramah terhadap lingkungan. Produk yang ramah lingkungan juga akan menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih berkelanjutan.

Memang, ekonomi dan lingkungan sejak lama menjadi oksimoron. Keduanya dianggap sebagai *trade-off*. Seolah-olah ada pilihan yang harus dibuat, antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengorbankan lingkungan, atau menjaga lingkungan dengan mengorbankan kesejahteraan banyak orang. Untuk mendapatkan yang satu, harus mengorbankan yang lain. Padahal, output setiap kegiatan ekonomi akan menghasilkan efek samping berupa eksternalitas. Tak jarang, eksternalitas yang berkembang adalah negatif dan seringkali tidak dipandang dan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan kinerja sebuah ekonomi (Utami, 2022).<sup>63</sup>

Semua stakeholder sepakat bahwa pertambangan menjadi produk yang paling tidak ramah lingkungan. Beberapa waktu terakhir, elemen masyarakat bersama dengan pemerintah Kabupaten Trenggalek sepakat menolak dengan rencana tambang emas yang akan dilaksanakan oleh PT. SMN. Meskipun secara ekonomi akan memberikan sumbangan terhadap daerah, pelaksanaan tambang di daerah lain yang akhirnya merusak lingkungan dikhawatirkan juga terjadi di Kabupaten Trenggalek. Tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi donat (*doughnout economy*)

<sup>63</sup> Utami, Andhita Firselli, 2022. *Menjadi: Seni Membangun Kesadaran Tentang Diri dan Sekitar*. Jakarta: Kompas Gramedia.

yang dicetuskan oleh Kate Rawort<sup>64</sup> (seorang ekonom Harvard University). Menurutnya, ekonomi hanya bisa bertumbuh jika fondasi sosial telah terpenuhi dan batas-batas lingkungan seperti kondisi udara, air bersih, lahan, kehati, ozon dan sebagainya tidak terlampaui. Oleh karena itu, menjadi penting bahwa penentuan produk unggulan daerah di Kabupaten Trenggalek juga memasukkan kriteria lingkungan sebagai salah satu pertimbangan.

## 5. Kriteria Ketersediaan Pasar

Pasar merupakan kriteria yang sangat penting sebagai referensi dalam menentukan produk unggulan daerah. Berapapun produksi yang dihasilkan, tidak akan memberikan manfaat secara ekonomi jika tidak mampu diserap pasar. Pasar juga merupakan kriteria yang wajib dipertimbangkan dalam penentuan produk unggulan (Permendagri Nomor 9 Tahun 2014). Adapun perhitungan kriteria Ketersediaan Pasar terhadap masing-masing produk berdasarkan persepsi seluruh stakeholder sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel Hasil AHP Perbandingan Alternatif Produk terhadap Kriteria Ketersediaan Pasar

No	Alternatif Produk	Bobot				
		Pemerintah	Bisnis	Komunitas	Media Massa	Gabungan
1	Perikanan	19,5	5,6	22,4	17,8	19,1
2	Perkebunan	9,1	3,2	18,2	14,1	9,8
3	Kehutanan	4,2	1,4	1,9	11	4,2
4	Biofarmaka	5,7	4,2	8,4	3,1	5,9
5	Peternakan	8,7	2,5	6,6	8,6	8,3
6	Buah-buahan	9,3	2,2	14	22,4	9,9
7	Sayur-sayuran	4,4	1,6	11	5,2	4,8
8	Fesyen	5,2	15	2,4	2,4	5,4
9	Pertambangan	4,8	6,9	5,2	1,2	4,8
10	Tanaman pangan	12,4	17,4	4	1,9	10,7
11	Pariwisata	6,7	8,2	3,1	6,6	6,9
12	Kuliner	5,6	21,2	1,4	4	5,9
13	Kriya	4,5	10,6	1,4	1,5	4,3
Consistency Ratio (CR)		0,00	0,04	0,03	0,03	0,00

Sumber: Hasil AHP dengan Expert Choice, 2023

Menurut stakeholder pemerintah, pelaku bisnis, komunitas kreatif dan media masa, produk yang memiliki ketersediaan pasar yang memadai adalah **perikanan, tanaman pangan, dan buah-buahan**. Dari hasil perhitungan AHP, nilai CR perbandingan alternatif semua dibawah 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa matrik perbandingan berpasangan kombinasi stakeholder sudah konsisten.

Berdasarkan analisis LQ sebelumnya, sektor yang menjadi basis dalam artian memiliki kelebihan produksi setelah mampu mencukupi kebutuhan lokal adalah sektor 1) Pertanian,

<sup>64</sup> Rawort, Kate, 2017. Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st century Economist. London: Penguin Random House.

Perikanan, dan Kehutanan; 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian; dan 3) Sektor jasa-jasa. Kelebihan produksi tersebut memberikan peluang bagi Kabupaten Trenggalek untuk memasarkannya di luar daerah bahkan luar negeri (ekspor). Namun, berdasarkan data BPS (2021), hanya 1 desa yang memiliki produk unggulan yang menembus pasar ekspor yaitu Desa Dongko dengan produk olahan bambu yang mampu menembus pasar eropa. Selain bambu, produk Kabupaten Trenggalek yang berdaya saing dan memiliki potensi perluasan pasar adalah durian jenis ripto yang merupakan varietas durian yang hanya ada di Kabupaten Trenggalek. Bahkan, hutan durian terluas di Asia terletak di Kabupaten Trenggalek (kompas.com, 2023).<sup>65</sup>

Pasar erat kaitannya dengan daya saing daerah (BRIN, 2023). Dalam perhitungan indeks daya saing daerah, pasar merupakan salah satu komponen kunci selain SDM, lingkungan pendukung, dan ekosistem inovasi. Daerah disebut berdaya saing jika menjadi tujuan pasar serta memiliki ukuran pasar yang besar (biasanya diakitkan dengan besar PDRB). Kabupaten Trenggalek bukanlah merupakan tujuan pasar yang baik bagi produk. Hal ini terbukti dengan perhitungan IDSD 2022 yang menempatkan pilar pasar produk dalam kategori sedang (skor 2,96 dari maks. 5) dan pilar ukuran pasar dalam kategori sangat rendah (skor 0,86 dari maks.5).

Namun, bisa jadi pasar dari produk unggulan di suatu daerah terletak di luar daerah itu sendiri. Untuk menambah (memperluas) pasar baru maka diperlukan daya saing sebuah produk. Produk harus memiliki keunikan (Zulfikar, 2019), berkualitas, dan terdiversifikasi (Pradigda, 2017). Jika tidak, pemasaran produk akan mengalami kesulitan karena kalah bersaing dengan produk industri besar dan produk impor.

## 6. Kriteria Ketersediaan Bahan Baku

Bahan baku merupakan salah satu kriteria yang penting dalam menentukan produk unggulan daerah. Bahan baku merupakan input bagi proses pengolahan komoditas menjadi produk yang bernilai tambah. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyediaan bahan baku yaitu ketersediaan, harga, kesinambungan, dan harus ramah lingkungan. Ketersediaan bahan baku lokal juga berpotensi menciptakan peluang kerja (*job creation*) (Arsyad, 2004). Adapun perhitungan kriteria Ketersediaan Bahan Baku terhadap masing-masing produk berdasarkan persepsi seluruh stakeholder sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel Hasil AHP Perbandingan Alternatif Produk terhadap Kriteria Ketersediaan Bahan Baku

No	Alternatif Produk	Bobot				
		Pemerintah	Bisnis	Komunitas	Media Massa	Gabungan
1	Perikanan	17,2	11	22,1	22	18,3
2	Perkebunan	8,2	8,5	10,9	17,4	9,5
3	Kehutanan	7,5	7,2	8,6	8,6	8
4	Biofarmaka	7,4	5,4	10,5	2,5	6,9
5	Peternakan	12,2	4,2	3	10,9	10,4

<sup>65</sup> <https://travel.kompas.com/read/2023/06/15/071300227/desa-wisata-durensari-trenggalek-punya-hutan-durian-terbesar-di-asia-tenggara?page=all>

No	Alternatif Produk	Bobot				
		Pemerintah	Bisnis	Komunitas	Media Massa	Gabungan
6	Buah-buahan	7,7	3,3	5	14	7,7
7	Sayur-sayuran	5,5	2,6	3,8	4,1	5,2
8	Fesyen	1,8	1,4	1,5	3,4	1,9
9	Pertambangan	2,9	17,4	1,2	1,2	3
10	Tanaman pangan	16,8	21,3	15	5,8	16,1
11	Pariwisata	5,4	2,1	14,1	5,3	5,6
12	Kuliner	3,9	1,7	2,3	1,5	3,4
13	Kriya	3,6	14	1,9	3,2	4
Consistency Ratio (CR)		0,00	0,03	0,06	0,07	0,00

Sumber: Hasil AHP dengan Expert Choice, 2023

Menurut stakeholder pemerintah, pelaku bisnis, komunitas kreatif dan media masa, produk yang memiliki ketersediaan bahan baku adalah **perikanan, tanaman pangan, dan peternakan**. Dari hasil perhitungan AHP, nilai CR perbandingan alternatif semua dibawah 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa matrik perbandingan berpasangan kombinasi stakeholder sudah konsisten.

Bahan baku merupakan salah satu kriteria yang tidak wajib bagi penentuan produk unggulan daerah (Permendagri Nomor 9 Tahun 2014). Namun, regulasi tersebut menekankan bahwa bahan baku yang digunakan untuk proses produksi harus dapat diperbaharui dan ramah lingkungan.

Dalam perpektif teori daya saing Diamond Porter, bahan baku merupakan salah satu faktor kondisi selain teknologi dan modal. Menurutnya, faktor kondisi itu bukan “diwariskan” tetapi diciptakan. Oleh karena itu, bagi daerah yang tidak memiliki bahan baku, bisa mengambil peran sebagai pengolah bahan baku yang ada di daerah lain sehingga akan meningkatkan *value added* produk. Sebagai contoh, negara Singapura yang tidak memiliki bahan baku terutama kekayaan alam tetapi tetap memiliki daya saing yang tinggi akibat kemampuannya dalam mensinergikan dan mengoptimalkan *knowledge management* dalam menghasilkan inovasi-inovasi.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Sandrina, et., al., 2015; dan Pradigda, 2016, bahwa bahan baku tidak menjadi pertimbangan utama yang digunakan sebagai kriteria penentuan produk unggulan daerah. Stakeholder di Kabupaten Trenggalek menganggap bahwa ketersediaan bahan baku sangat penting bagi keberlangsungan dan keberlanjutan pengembangan produk unggulan daerah, bahkan bobotnya lebih besar daripada kriteria pasar. Hal ini dilandasi dengan asumsi bahwa Kabupaten Trenggalek memang lebih cocok berperan sebagai produsen produk dibandingkan dengan lokasi pasar. Hal ini senada dengan penelitian Yufit, et., al., 2017; yang menyimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku lokal harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan produk unggulan di Kabupaten Magetan, Ponorogo, dan Pacitan.

## 7. Kriteria Keterkaitan dengan Sektor Lainnya

Produk unggulan yang baik harus memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan dengan produk/kegiatan ekonomi lainnya baik di masa sekarang serta peluang di masa depan yang besar. Keterkaitan antar sektor akan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. Adapun

perhitungan kriteria Keterkaitan dengan Sektor Lainnya terhadap masing-masing produk berdasarkan persepsi seluruh stakeholder sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel Hasil AHP Perbandingan Alternatif Produk terhadap Kriteria Keterkaitan Dengan Sektor Lainnya

No	Alternatif Produk	Bobot				
		Pemerintah	Bisnis	Komunitas	Media Massa	Gabungan
1	Perikanan	10,2	3,4	19	11	10,5
2	Perkebunan	6,9	4	3	8,6	6,6
3	Kehutanan	5,6	2,6	1,2	6,6	5
4	Biofarmaka	6,7	15,5	1,9	2,4	6,2
5	Peternakan	6,8	1,6	1,5	5,2	5,6
6	Buah-buahan	7,5	6,9	7,9	4	7,5
7	Sayur-sayuran	7,1	5,7	6,6	3,1	6,8
8	Fesyen	4,3	13,9	13,8	1,5	5,1
9	Pertambangan	2,4	1,3	4	1,2	2,4
10	Tanaman pangan	11,7	1,8	3,1	14,1	9,7
11	Pariwisata	14	18,4	22	22,4	16,5
12	Kuliner	10,6	14,7	10,5	17,8	12
13	Kriya	6,2	10,3	5,4	1,9	6,1
Consistency Ratio (CR)		0,00	0,05	0,05	0,03	0,00

Sumber: Hasil AHP dengan Expert Choice, 2023

Menurut stakeholder pemerintah, pelaku bisnis, komunitas kreatif dan media masa, produk yang memiliki ketersediaan bahan baku adalah **pariwisata, kuliner, dan perikanan**. Dari hasil perhitungan AHP, nilai CR perbandingan alternatif semua dibawah 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa matrik perbandingan berpasangan kombinasi stakeholder sudah konsisten.

Pendapat gabungan stakeholder menempatkan pariwisata sebagai produk yang memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya. Artinya, pariwisata memiliki keterkaitan ke belakang (*backward*) dan ke depan (*forward*) yang kuat sehingga akan membentuk kemitraan yang saling menguntungkan. Pariwisata mempunyai *multiplier effect* yang bisa berdampak pada perkembangan sebuah wilayah.<sup>66</sup> Pariwisata dipercaya dapat menyediakan lapangan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sektor pariwisata terbentuk melalui agregasi berbagai sektor diantaranya 1) Angkutan, Pergudangan, Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir; 2) Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman; 3) Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; dan 4) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Saputra, 2014 dalam Aji, et., al., 2018).<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Kotler, Philip., Haider, Donald H., dan Rein, Irving, Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations. The Free Press A Division of Maximilian, Inc. New York, 1993.

<sup>67</sup> Aji, Riswandha Risang et., al., 2018. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap ekonomi Wilayah di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Planoearth. Vol. 3. No. 2. Hal. 57-62. DOI: [10.31764/jpe.v3i2.600](https://doi.org/10.31764/jpe.v3i2.600)

Berdasarkan penelitiannya, Aji, et., al., (2018)<sup>68</sup> menyimpulkan bahwa pariwisata di Provinsi Jawa Timur memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat. *Forward linkage* dari kegiatan pariwisata diantaranya sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 1,41. Hal ini berarti setiap peningkatan output sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 1 juta maka akan meningkatkan output permintaan total sektor pariwisata sebesar 1,41 juta. *Forward linkage* terbesar kedua provinsi Jawa Timur adalah sektor Angkutan, Pergudangan, Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir kemudian sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman. Sedangkan *backward linkage* pariwisata diantaranya berturut-turut Informasi dan Komunikasi; Angkutan, Pergudangan, Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir; jasa pendidikan; Jasa Perusahaan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan terakhir Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman.

## 8. Kriteria Dukungan Pemerintah

Produk unggulan sebaiknya memiliki dukungan pemerintah baik berupa kebijakan, regulasi, maupun penganggaran. Dukungan pemerintah khususnya kebijakan akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah juga harus menjamin perizinan usaha yang mudah dan cepat (tidak birokratis) sehingga merangsang masyarakat untuk berwirausaha dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Pemerintah juga diharapkan mengalokasikan cukup anggaran untuk fasilitasi, pembinaan, serta pelatihan kapasitas masyarakat untuk berwirausaha. Adapun perhitungan kriteria Dukungan Pemerintah terhadap masing-masing produk berdasarkan persepsi seluruh stakeholder sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel Hasil AHP Perbandingan Alternatif Produk terhadap Kriteria Dukungan Pemerintah

No	Alternatif Produk	Bobot				
		Pemerintah	Bisnis	Komunitas	Media Massa	Gabungan
1	Perikanan	15	7	22,4	5,2	14,2
2	Perkebunan	8,9	5,3	14,1	14,2	9,9
3	Kehutanan	4,8	3,9	1,9	3,2	4,5
4	Biofarmaka	4	8,6	6,6	2,5	4,6
5	Peternakan	10,2	3,2	2,4	6,7	8,4
6	Buah-buahan	6,9	2,6	11	11,1	7,3
7	Sayur-sayuran	4,7	2,1	8,6	8,6	5,2
8	Fesyen	3,9	21,3	5,2	1,5	4,6
9	Pertambangan	2,4	1,4	1,7	1,3	2,2
10	Tanaman pangan	21,8	17,1	4,1	17,3	19,4
11	Pariwisata	9,6	11,9	17,7	22,5	11,8
12	Kuliner	4,6	13,9	3,1	4,1	5,2
13	Kriya	3,2	1,7	1,2	1,9	2,8
Consistency Ratio (CR)		0,00	0,03	0,04	0,03	0,00

Sumber: Hasil AHP dengan Expert Choice, 2023

<sup>68</sup> ibid

Menurut stakeholder pemerintah, pelaku bisnis, komunitas kreatif dan media masa, produk yang memiliki dukungan pemerintah adalah **tanaman pangan, perikanan, dan pariwisata**. Dari hasil perhitungan AHP, nilai CR perbandingan alternatif semua dibawah 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa matrik perbandingan berpasangan kombinasi stakeholder sudah konsisten.

Sebagai produk unggulan daerah, tanaman pangan, perikanan dan pariwisata memang sudah seharusnya mendapatkan dukungan dari pemerintah. Dukungan pemerintah disini lebih kepada dukungan terhadap regulasi dan kelembagaan. Pemerintah Kabupaten Trenggalek memebrikan perhatian khusus di sektor pariwisata. Perhatian tersebut diwujudkan dalam rencana pembangunan jangka menengah khususnya misi ke 2 yaitu: Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata berbasis kolaborasi dan berkelanjutan dimulai dari pemberdayaan masyarakat desa.<sup>69</sup> Program strategisnya adalah Sadewa atau merupakan akronim Seratus Desa Wisata. Dengan ditetapkannya sebagai salah satu misi pembangunan, maka ada jaminan bahwa program tersebut akan mendapatkan prioritas baik kebijakan, regulasi, atau pendanaan. Untuk mempercepat tercapainya target 100 desa wisata, pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui kolaborasi antar OPD juga memperkuat kelembagaan desa wisata dalam bentuk Pokdarwis.

Stakeholder (responden) dalam penelitian ini juga sepakat bahwa produk tanaman pangan dan perikanan juga mendapatkan prioritas dukungan pemerintah. Jika dibandingkan dengan kota, desa memang memiliki beberapa keunggulan terutama potensi pangan, air bersih, dan udara bersih. Tanaman pangan dan perikanan merupakan salah satu sumber pangan yang dimiliki Trenggalek. Kedua produk ini juga menyerap banyak tenaga kerja sehingga dukungan pemerintah terhadap keduanya selama ini memang tindakan yang tepat.

## 9. Kriteria Kondisi Input (infrastruktur, sarpras, teknologi, modal)

Dalam perspektif pengembangan klaster industri, untuk meningkatkan daya saing daerah, diperlukan 4 faktor yaitu *factor condition*, *demand condition*, *related and supported industries* dan *firm strategy* (Porter, 1990)<sup>70</sup>. Ketersediaan infrastruktur, sarpras, teknologi, dan modal merupakan *factor condition*. Menurut Porter, kunci utama faktor kondisi adalah “diciptakan” bukan diperoleh dari warisan. Lebih jauh, kelangkaan sumber daya seringkali membantu negara menjadi kompetitif. Adapun perhitungan kriteria Kondisi Input terhadap masing-masing produk berdasarkan persepsi seluruh stakeholder sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel Hasil AHP Perbandingan Alternatif Produk terhadap Kriteria Kondisi Input

No	Alternatif Produk	Bobot				
		Pemerintah	Bisnis	Komunitas	Media Massa	Gabungan
1	Perikanan	19,5	6,5	22,2	14	18,8
2	Perkebunan	8,8	5,2	6,6	11	9
3	Kehutanan	5,3	4	1,9	5,2	5,1
4	Biofarmaka	4,4	3,1	4,3	2,4	4,3

<sup>69</sup> RPJMD Kabupaten Trenggalek 2021-2026

<sup>70</sup> Porter, M. E. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press.

No	Alternatif Produk	Bobot				
		Pemerintah	Bisnis	Komunitas	Media Massa	Gabungan
5	Peternakan	7,6	2,1	8,2	8,5	7,4
6	Buah-buahan	5,2	11	14	2,1	5,9
7	Sayur-sayuran	3,8	9,9	12,6	4,1	4,8
8	Fesyen	3	2,1	16,8	2,8	3,6
9	Pertambangan	3,8	18	1,5	1,2	3,9
10	Tanaman pangan	17,1	12,9	4,7	17,7	16,1
11	Pariwisata	12,2	22,3	3,5	22,3	12,9
12	Kuliner	5,4	1,2	2,5	6,7	4,9
13	Kriya	4	1,5	1,3	1,9	3,4
Consistency Ratio (CR)		0,00	0,04	0,05	0,05	0,00

Sumber: Hasil AHP dengan Expert Choice, 2023

Menurut stakeholder pemerintah, pelaku bisnis, komunitas kreatif dan media masa, produk yang memiliki dukungan kondisi input adalah **perikanan, tanaman pangan, dan pariwisata**. Dari hasil perhitungan AHP, nilai CR perbandingan alternatif semua dibawah 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa matrik perbandingan berpasangan kombinasi stakeholder sudah konsisten.

Produk perikanan Kabupaten Trenggalek merupakan produk yang mendapatkan dukungan kondisi input yang tinggi terutama dukungan penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana. Pusat perikanan Kabupaten Trenggalek saat ini terletak di Kecamatan Watulimo dengan dukungan infrastruktur JLS dan pelabuhan (niaga dan perikanan). Kedua infrastruktur vital tersebut mempermudah arus distribusi barang produk perikanan. Tidak berbeda dengan perikanan, pariwisata andalan Kabupaten Trenggalek juga terpusat di Kecamatan Watulimo. Dengan terbukanya akses JLS, juga mempermudah aksesibilitas wisatawan menuju kesana. Kemudahan aksesibilitas akan mengurangi tingginya biaya wisata (transportasi) yang selama ini dikeluhkan wisatawan.

Selain infrastruktur fisik, kondisi input yang juga harus diperhatikan adalah aspek dukungan teknologi bagi proses produksi. Dalam proses produksi, penggunaan teknologi memiliki peran penting dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas produksi. Pemanfaatan teknologi akan meningkatkan produktivitas dan kualitas (mutu) produk. Menurut Ruzzante, et., al., (2021)<sup>71</sup>, teknologi di sektor pertanian meliputi: 1) manajemen sumber daya alam; 2) pengembangan varietas; 3) input kimia; dan 4) mekanisasi dan infratruktur. Tanaman pangan dan perikanan di Kabupaten Trenggalek selama ini telah mendapatkan sentuhan teknologi dalam proses produksi. Lebih lanjut, produk pariwisata juga membutuhkan adopsi teknologi terutama sebagai *tools* untuk pemasaran. Selama ini, berkembangnya desa wisata di Indonesia (termasuk Trenggalek) tidak diikuti dengan

<sup>71</sup> Ruzzante, S., Labarta, R., & Bilton, A. 2021. Adoption of agricultural Technology in the Developing World: a Meta-Analysis of the Empirical Literature. World Development, 146. 105599. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105599>

meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dengan baik sebagai wadah interaksi antara pengelola wisata dengan pelanggan (wisatawan) (Ananda dan Dirgahayu, 2021).<sup>72</sup>

Kondisi input lainnya yang perlu diperhatikan dalam menentukan produk unggulan daerah adalah modal. Modal merupakan ketersediaan dan kecukupan dana bagi kelancaran usaha untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Modal tidak harus dicukupi oleh pengusaha sendiri jika memang memiliki keterbatasan modal. Pemerintah dapat memfasilitasi untuk membuka akses pemodal baik ke perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Pemerintah juga harus mendorong pelaku usaha untuk bermitra dengan investor. Tentunya investor memiliki kriteria khusus bagi calon pelaku usaha.

## 10. Hasil AHP Penentuan Produk Unggulan Daerah

Setelah dilakukan analisis berdasarkan prioritas kriteria maupun alternatif produk berdasarkan masing-masing stakeholder pakar, maka dihasilkan prioritas penentuan produk unggulan daerah Kabupaten Trenggalek. Prioritas pertama produk unggulan Kabupaten Trenggalek adalah tanaman pangan dengan bobot 15,8. Prioritas kedua adalah perikanan dengan bobot 15,2; dan prioritas ketiga adalah perkebunan dengan bobot 10,1. Prioritas berikutnya berturut-turut adalah peternakan, buah-buahan, serta pariwisata. Hal yang cukup menarik untuk dicermati adalah bobot antara prioritas pertama dan kedua hampir sama sehingga dapat disimpulkan bahwa memang produk unggulan daerah Kabupaten Trenggalek adalah tanaman pangan dan perikanan (berserta olahannya/turunannya). Adapun prioritas pertama sampai dengan ketigabelas produk unggulan daerah di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Prioritas Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Trenggalek

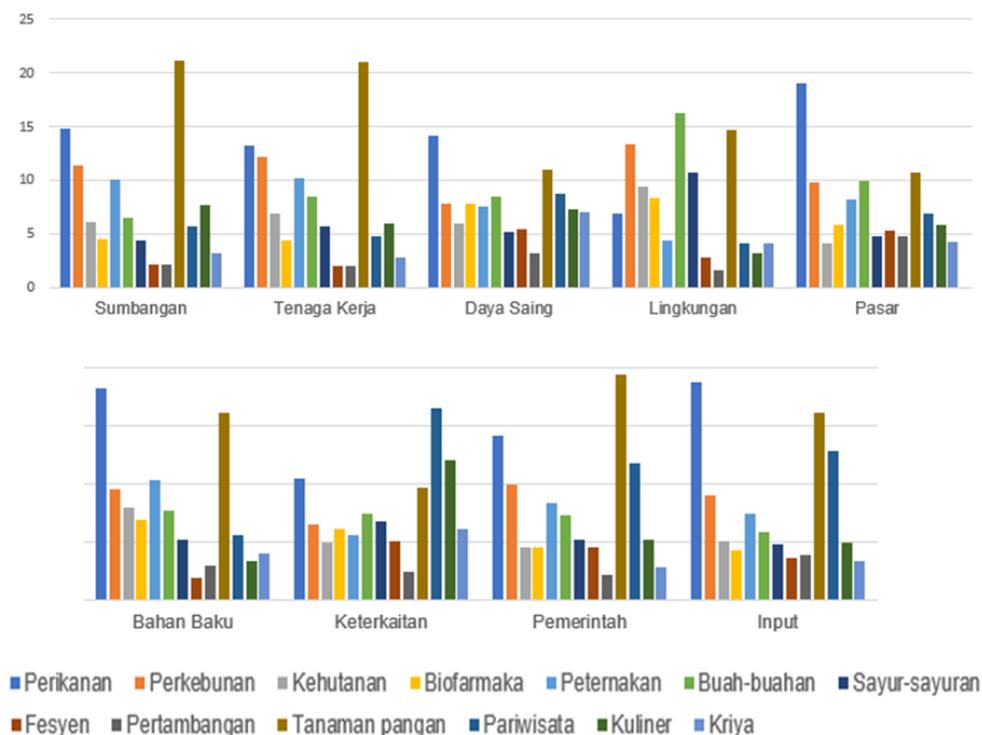
No	Alternatif Produk	Bobot	Ranking
1	Tanaman pangan	15,8	1
2	Perikanan	15,2	2
3	Perkebunan	10,1	3
4	Peternakan	8,7	4
5	Buah-buahan	8,6	5
6	Pariwisata	7,3	6
7	Kehutanan	6,3	7
8	Biofarmaka	5,9	8
9	Kuliner	5,9	9
10	Sayur-sayuran	5,5	10
11	Kriya	4,2	11
12	Fesyen	3,5	12
13	Pertambangan	2,9	13

Consistency Ratio (CR) = 0,00

Sumber: Hasil AHP dengan Expert Choice, 2023

<sup>72</sup> Ananda, Ibnu dan Teduh Dirgahayu, 2021. Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Desa Wisata di Indonesia: A Systematic Literature Review. Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Vol. 8, No. 4. DOI: <https://doi.org/10.35957/jatisi.v8i4.1095>

Ketika dirinci menurut kriteria penentuan produk unggulan daerah maka dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar Ranking Produk Unggulan Berdasarkan Kriteria  
Sumber: Penulis, 2023 (*expert choice*, diolah)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa produk tanaman pangan unggul (menempati peringkat 1) di 3 kriteria yaitu sumbangan terhadap ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan dukungan pemerintah sedangkan produk perikanan unggul di 4 kriteria yaitu memiliki daya saing, ketersediaan pasar, ketersediaan bahan baku, dan memiliki kondisi input yang cukup memadai. Kedua produk unggulan tersebut memiliki selisih bobot yang sangat kecil yaitu 0,6.

### 10.1. Tanaman Pangan

Sebagai kawasan pedesaan, Kabupaten Trenggalek memiliki kekayaan tanaman pangan yang cukup berlimpah seperti padi, jagung, ubi kayu, dan kacang kedelai. Puncaknya, pada tahun 2016 produksi padi mencapai 210.925 ton setahun tetapi mengalami penurunan tiap tahun sampai dengan tahun 2019. Namun, kembali mengalami kenaikan kembali tahun 2021 menjadi 169.372 ton. Padi, yang outputnya beras sampai dengan saat ini dan masa depan masih akan menjadi makanan pokok masyarakat. Tantangannya adalah jumlah petani dan lahan sawah semakin hari semakin berkurang akibat konversi lahan menjadi perumahan. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena kebutuhan ruang perumahan akan bertambah seiring dengan perkembangan jumlah penduduk.

Tabel Produksi Tanaman Pangan (dalam ton)

Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
Padi	210.925	187.226	166.815	163.807	164.784	169.372

Uraian	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
Jagung	98.668	66.897	84.446	110.052	104.260	132.306
Kacang kedelai	9.202	11.551	8.380	4.800	1.721	3.809
Ubi kayu	205.653	228.245	246.430	183.107	135.206	285.804

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2023

Berbeda dengan padi, produksi jagung dan ubi kayu relatif mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir. Jika tanaman padi sebagian besar tumbuh di dataran, jagung relatif bisa tumbuh di dataran maupun pegunungan di Kabupaten Trenggalek. Jagung juga potensial dikembangkan menjadi produk olahan. Semua bagian tumbuhan jagung mulai dari daun, buah, dan batangnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Daun bisa didiversifikasi menjadi pakan dan kompos; batang bisa dimanfaatkan menjadi pulp, kertas, dan bahan bakar. Sedangkan bagian tubuh jagung yang banyak manfaatnya adalah buah jagung yang bisa diolah menjadi input bagi industri makanan manusia maupun ternak (Amzeri, 2018).<sup>73</sup>

Tanaman pangan lainnya yang khas Trenggalek adalah ubi kayu (singkong). Bahkan, Trenggalek di masa lalu terkenal dengan kota gapek.<sup>74</sup> Singkong merupakan salah satu umbi-umbian yang dapat dijadikan komoditas pengganti makanan pokok masyarakat yaitu beras. Pola konsumsi pangan yang tergantung pada padi (beras) menyebabkan terjadinya kerawanan perubahan lingkungan global. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengurangi ketergantungan pangan pokok beras melalui diversifikasi pangan (Latifah dan Prahardini, 2020).<sup>75</sup> Semua bagian tumbuhan ubi kayu juga dapat dimanfaatkan manusia mulai umbinya sendiri, batang, dan daun. Ubi kayu dapat didiversifikasi menjadi bahan pangan seperti gapek, tepung, gula, mocaf, dan tape ketela (Bappenas, 2009 dalam Indraprahasta, 2013)<sup>76</sup> Kabupaten Trenggalek sendiri pernah menjadi proyek percontohan nasional dalam pengolahan ubi kayu menjadi mocaf. Mocaf merupakan produk yang dikembangkan dari bagian umbi, khususnya pati yang telah difermentasikan. Mocaf digunakan sebagai substitusi tepung terigu yang selama ini berbahan baku gandum hasil impor. Namun, pengembangan mocaf di Kabupaten Trenggalek tidak berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan pergantian kepala daerah (Indraprahasta, 2013).<sup>77</sup> Lebih lanjut, Roidah (2022)<sup>78</sup> dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa industrialisasi ubi kayu (singkong) di Kabupaten Trenggalek belum layak dilaksanakan. Menurutnya, prasyarat industrialisasi seperti subsistem input, produksi, pengolahan, pemasaran, dan pendukung tidak dilaksanakan optimal karena petani memosisikan ubi kayu hanya sebagai tanaman sampingan.

<sup>73</sup> Amzeri, Ahmad, 2018. Tinjauan Perkembangan Pertanian Jagung di Madura dan Alternatif Pengolahan Menjadi Biomaterial. *Jurnal Rekayasa*. Vol. 11, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.21107/rekayasa.v11i1.4127>

<sup>74</sup> <https://surabaya.kompas.com/read/2022/02/22/133042878/sejarah-trenggalek-kabupaten-berjudul-kota-gapek-yang-asal-usulnya-dari?page=all>

<sup>75</sup> Latifah, Evi dan Prahardini, 2020. Identifikasi dan Deskripsi Tanaman Umbi-Umbian Pengganti Karbohidrat di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Penelitian Agronomi*. Vol. 22 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.20961/agsipa.v22i2.43787>

<sup>76</sup> Indraprahasta, Galuh Syahbana, 2013. Potensi Pengembangan Singkong sebagai Pengganti Tepung: Kasus di Kabupaten Trenggalek. Dalam buku: *Sistem Inovasi Daerah: Inovasi Teknologi dalam Pengembangan Ekonomi Lokal* (2013). Bogor: IPB Press.

<sup>77</sup> *ibid*

<sup>78</sup> Roidah, I, S., Setiawati, Laily, 2022. The Linkage Among The Agribusiness System Cassava Industrialization in Trenggalek Regency, East Java, Indonesia. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ*. DOI: 10.1088/17551315/1005/1/012024 atau <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1005/1/012024>

Selain itu, proses industrialisasi juga tidak berjalan karena pengolahan bahan baku tidak terjadi dan masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana.

## 10.2. Perikanan

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan minapolitan di Indonesia<sup>79</sup>. Berdasarkan kondisi wilayah Kabupaten Trenggalek yang berada di pesisir selatan Jawa Timur maka diperlukan pengembangan kawasan minapolitan lebih lanjut. Pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Trenggalek didasarkan pada kenyataan bahwa Kabupaten Trenggalek mempunyai potensi perikanan yang cukup besar, baik potensi perikanan tangkap maupun budidaya. Data Trenggalek Dalam Angka (TDA) 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek<sup>80</sup> menyebutkan bahwa nilai produksi perikanan tangkap di Kabupaten Trenggalek tahun 2021 mencapai 13.952,67 ton dengan nilai produksi 148,8 milyar dan perikanan budidaya mencapai 4.670,76 ton dengan nilai produksi 121 milyar.

Tabel Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut

No	Kecamatan	Produksi Tangkap					
		2020		2021		2022	
		Produksi (ton)	Nilai (000 Rp.)	Produksi (ton)	Nilai (000 Rp.)	Produksi (ton)	Nilai (000 Rp.)
1	Panggul	173,47	2.959.715	194,81	2.898.599,75	505,82	6.166.324
2	Munjungan	225,42	3.205.308	432,22	6.137.881,53	1.699	18.060.823
3	Watulimo	25.011,61	218.186.547,82	21.495,33	210.555.596,15	11.747,85	124.582.535
	Total	25.410,5	224.351.570,82	22.125,36	219.592.077,43	13.952,67	148.809.682

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek, 2021-2023

Produksi perikanan tangkap di laut mengalami penurunan setiap tahunnya terutama di Kecamatan Watulimo. Berbeda dengan Watulimo, sebenarnya Panggul dan Munjungan produksinya mengalami peningkatan. Namun, karena proporsi produksi terbesar dihasilkan laut yang ada di Kecamatan Watulimo, total produksi secara keseluruhan akhirnya mengalami penurunan. Komoditas utama perikanan tangkap di Kabupaten Trenggalek antara lain tongkol, cakalang, tuna, dan lobster.

Tabel Produksi Perikanan dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap tahun 2022

No	Kecamatan	Tongkol		Cakalang		Lobster		Tuna	
		Vol. (ton)	Nilai (000 Rp)	Vol. (ton)	Nilai (000 Rp)	Vol. (ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (ton)	Nilai (000 Rp)
1	Panggul	104,57	947.694,80			0,55	148.570		
2	Munjungan	684,58	6.096.956,80	7,99	108.347,40	0,52	124.910		
3	Watulimo	6.009,12	59.102.291,00	871,52	13.449.367,00	0,76	155.960	406,57	10.118.678,5
	Total	6.798,27	66.146.942,6	879,5	13.557.714,4	1,83	429.440	406,57	10.118.678,5

Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2023

<sup>79</sup> Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan

<sup>80</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek. (2023). "Trenggalek Dalam Angka 2023." Trenggalek: Badan Pusat Statistik

Selain produk perikanan tangkap di laut, Kabupaten Trenggalek juga kaya akan sumber daya perikanan budidaya yang tersebar di semua kecamatan. Pada tahun 2022, nilai produksi perikanan budidaya terbesar berasal dari Kecamatan Watulimo sebesar 34,3 milyar, kemudian Kecamatan Durenan sebesar 15,1 milyar, dan Kecamatan Karanganyar sebesar 13,1 milyar. Jika dilihat dari volume produksinya, Kecamatan Watulimo sebenarnya berada di bawah Kecamatan Durenan. Kecamatan Durenan memiliki volume produksi sebesar 860,52 ton sedangkan Kecamatan Watulimo “hanya” 568,75 ton. Hal ini dikarenakan perbedaan komoditas antar kedua kecamatan tersebut. Kecamatan Watulimo memiliki produksi komoditas udang tambak yang harga jualnya tinggi sedangkan Kecamatan Durenan produksinya sebagian besar berupa komoditas lele dengan harga jual yang lebih rendah.

Tabel Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya

No	Kecamatan	Produksi Budidaya					
		2020		2021		2022	
		Produksi (ton)	Nilai (000 Rp.)	Produksi (ton)	Nilai (000 Rp.)	Produksi (ton)	Nilai (000 Rp.)
1	Panggul	401,07	27.428.834,70	185	11.632.898	172,13	11.289.094,50
2	Munjungan	324,15	23.326.640,00	149	10.190.925	121,85	8.943.930,00
3	Watulimo	522,05	30.994.436,90	297	14.375.629	568,75	34.332.892,50
4	Kampak	60,15	1.028.391,40	59	1.023.911	74,48	1.418.128,00
5	Dongko	12,83	202.008,20	11	189.505	10,98	188.785,50
6	Pule	15,22	238.477,80	14	231.744	14,33	248.714,00
7	Karangan	730,41	11.584.826,10	697	11.191.016	752,21	13.120.060,10
8	Suruh	12,57	196.645,30	11	179.581	11,51	199.344,00
9	Gandusari	429,28	6.784.654,40	595	9.489.501	574,12	9.766.775,00
10	Durenan	992,66	15.785.085,80	956	15.459.329	860,52	15.098.744,50
11	Pogalan	826,37	13.026.885,07	823	13.249.307	728,93	12.744.292,50
12	Trenggalek	352,28	5.717.207,20	347	5.783.697	300,64	5.563.024,00
13	Tugu	417,04	6.653.219,40	434	6.988.590	408,53	7.211.185,50
14	Bendungan	78,87	1.229.188,30	73	1.178.564	71,78	1.206.326,00
	Total	5.174,95	144.196.500,57	4.651,00	101.164.197,00	4.670,76	121.331.296,1

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek, 2021-2023

Produktivitas sektor perikanan di Kabupaten Trenggalek baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya tergolong tinggi setiap tahunnya. Alam masih menyediakan pasokan yang sangat melimpah. Kabupaten Trenggalek juga masih menjadi salah satu daerah penyuplai hasil perikanan di Provinsi Jawa Timur.<sup>81</sup> Namun, potensi perikanan yang ada belum dimanfaatkan secara optimal, industri pengolahan ikan tangkap yang tersedia hanya beberapa jenis yang keberadaannya belum mampu menyelesaikan keresahan para nelayan (Rokhim, 2017 dalam Aryanti dan Sardjito, 2018).<sup>82</sup> Lebih lanjut, beberapa penelitian juga menyimpulkan bahwa

<sup>81</sup> <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/03/28/2630/-produksi-dan-nilai-produksi-perikanan-tangkap-di-laut-dan-lainnya-menurut-kabupaten-kota-dan-komoditas-utama-di-provinsi-jawa-timur-2021.html>

<sup>82</sup> Aryanti, Oky Dwi dan Sardjito, 2018. Pengembangan Industri Prospektif Pengolahan Ikan Tangkap di Kawasan Minapolitan Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI). Bogor: IPB

industrialisasi pengolahan perikanan tangkap di Kabupaten Trenggalek khususnya Kecamatan Watulimo masih belum berkembang. Hal ini diindikasikan dengan industri pengolahan sebagian besar masih bersifat skala rumah tangga atau kecil, menggunakan teknologi yang sederhana, ketidaktahuan dan keterbelakangan pengetahuan masyarakat (minim inovasi), sehingga mutu produknya rendah, belum terstandarisasi, tidak ada diversifikasi dan akhirnya sulit menembus pasar yang lebih luas (Putri, 2016;<sup>83</sup> Hindradjit, et, al, 2017;<sup>84</sup> Rianto, et, al, 2018;<sup>85</sup> Aryanti, 2018<sup>86</sup>)

Tidak jauh berbeda dengan perikanan tangkap, budidaya perikanan darat juga masih mengandalkan penjualan bahan mentah sehingga nilai tambahnya juga kecil. Studi yang dilakukan oleh Bappedalitbang Trenggalek (2022),<sup>87</sup> menunjukkan bahwa pengolahan hasil perikanan budidaya di Kecamatan Durenan kurang berkembang. Pembudidaya lebih memilih langsung menjual hasil panennya langsung kepada konsumen, tengkulak, atau pedagang karena lebih cepat mendapatkan uang. Pengolahan yang ada masih bersifat tradisional, menggunakan sedikit campur tangan teknologi, modal kecil, dan skala usaha sebagian besar rumah tangga.

### 10.3. Perkebunan

Produk unggulan daerah berdasarkan perspektif stakeholder setelah tanaman pangan dan perikanan adalah produk yang dihasilkan dari komoditas perkebunan seperti kelapa, kopi, kakao, tebu, dan tembakau. Produksi tanaman perkebunan yang mempunyai kontribusi terbesar adalah produksi kelapa dan tebu masing-masing dengan produksi sebesar 7.658,63 ton dan 18.578,67 ton di tahun 2021 (BPS, 2023).<sup>88</sup> Namun, berdasarkan studi Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek (2020)<sup>89</sup>, produk perkebunan yang menjadi sektor basis di Kabupaten Trenggalek adalah kelapa dan kakao. Adapun produksi produk perkebunan Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Produksi Perkebunan

No	Kecamatan	Kelapa (ton)		Kopi (ton)		Kakao (ton)		Tebu (ton)		Tembakau (ton)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Panggul	1.912,00	1.866,00	33,20	27,60	58,38	46,78	-	-	20,00	16,77
2	Munjungan	669,01	836,30	71,52	74,00	2,61	2,77	-	-	0,97	-
3	Watulimo	1.292,98	1.304,66	37,74	38,70	31,74	32,45	800,00	591,75	-	-

<sup>83</sup> Putri, Hesty Ristiani, 2016. Arahana Pengembangan Kawasan Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Melalui Konsep Minapolitan. ITS: Surabaya

<sup>84</sup> Hindradjit, et, al, 2017. Industrialisasi Pengolahan Ikan Tangkap Skala Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Pantai Prigi, Trenggalek. Universitas Hang Tuah: Surabaya.

<sup>85</sup> Rianto, et, al, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pengolah Ikan Berorientasi Pada Skala Home Industry Pengolahan Ikan Tangkap di Wilayah Pesisir Kabupaten Trenggalek. Prosiding Conference on Economic and Business Adi Buana University of Surabaya.

<sup>86</sup> Aryanti, Oky Dwi, 2018. Arahana Pengembangan Industri Pengolahan Ikan Tangkap di Kawasan Minapolitan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. ITS: Surabaya.

<sup>87</sup> Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, 2022. Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Durenan. Melalui: <https://bappedalitbang.trenggalekkab.go.id/studi-kelayakan-pengembangan-kawasan-minapolitan-kecamatan-durenan/>. Diakses: 11/09/23

<sup>88</sup> BPS, 2023. Trenggalek Dalam Angka Tahun 2023.

<sup>89</sup> Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, 2020. Pemetaan Komoditas Ekspor-Impor Melalui Pelabuhan Prigi. Tidak Dipublikasikan

No	Kecamatan	Kelapa (ton)		Kopi (ton)		Kakao (ton)		Tebu (ton)		Tembakau (ton)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
4	Kampak	259,28	273,62	11,21	7,69	76,83	100,71	1.185,00	1.012,00	-	-
5	Dongko	532,06	551,13	3,76	6,51	158,37	102,76	364,00	388,50	-	-
6	Pule	392,66	463,19	81,30	64,08	222,19	183,54	3.433,75	3.433,75	-	-
7	Karangan	498,94	513,80	10,52	9,63	169,46	133,89	3.833,92	3.095,18	47,00	33,48
8	Suruh	555,89	569,01	0,73	0,93	146,65	69,95	175,00	252,85	2,50	1,08
9	Gandusari	63,10	69,98	5,10	5,58	14,13	14,46	1.288,00	1.766,80	0,82	2,31
10	Durenan	12,97	15,82	0,63	1,81	2,88	3,43	2.480,00	2.190,00	-	-
11	Pogalan	32,93	28,69	1,22	0,22	18,66	17,45	290,00	527,80	-	-
12	Trenggalek	319,75	188,30	1,00	1,58	13,77	14,63	850,00	1.212,00	-	-
13	Tugu	795,90	953,82	0,42	10,73	168,84	282,43	3.879,00	4.234,31	8,30	11,00
14	Bendungan	321,16	377,22	62,20	60,52	56,86	61,65	-	-	-	-
	Total	7.658,63	8.011,54	320,55	309,57	1.141,37	1.066,94	18.578,67	18.704,94	79,59	64,64

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek, 2021-2023

Kelapa dikenal sebagai tanaman kehidupan. Semua bagian dari pohon kelapa mulai dari akar sampai dengan daun dan buah bisa dimanfaatkan manusia. Melalui mekanisme diversifikasi vertikal, pohon kelapa bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi seperti pemanfaatan daging kelapa menjadi santan dan kopra; pengolahan air kelapa menjadi kecap, asam cuka, nata de coco; pemanfaatan tempurung kelapa untuk produk kerajinan, bahan bakar aktif; pemanfaatan sabut kelapa untuk kerajinan rumah tangga seperti sapu, karpet, tambang, tali; pemanfaatan tandan bunga menjadi gula merah, nira; serta pemanfaatan jantung kelapa dan getah menjadi gula aren (Pakasi, 2013).<sup>90</sup> Namun, sampai dengan saat ini, pemanfaatan dan pengolahan kelapa di Kabupaten Trenggalek masih menemui berbagai kendala/permasalahan diantaranya: 1) Produktivitas masih fluktuatif; 2) Sering terjadi serangan hama; 3) Skala usaha dan luas lahan kecil; 4) Kualitas SDM tenaga kerja masih rendah; 5) Minimnya penggunaan teknologi dan keterbatasan modal; serta 6) Minimnya diversifikasi produk.

Salah satu produk perkebunan lainnya yang strategis di Kabupaten Trenggalek adalah kakao. Sebagian besar perkebunan kakao di Kabupaten Trenggalek berada di Kecamatan Karang, Kecamatan Suruh dan Kecamatan Pule. Kondisi perkebunan kakao rakyat hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya: sebagian besar dikelola belum sesuai dengan petunjuk teknis dengan tingkat produksi, produktivitas dan mutu yang masih rendah, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang masih tinggi, modal usaha yang terbatas, akses informasi dan pasar belum memadai sehingga berdampak pada rendahnya daya saing petani (Bambang, 2012).<sup>91</sup> Permasalahan petani kakao tidak hanya masalah produksi dan pasca panen,

<sup>90</sup> Pakasi, Caroline Betsy Diana, 2013. Pengembangan Kelapa Sebagai Komoditi Unggulan Daerah Sulawesi Utara Dengan Pendekatan Kluster Industri. Disampaikan pada Seminar Nasional: Menggagas Kebangkitan Komoditas Unggulan Lokal Pertanian Dan Kelautan.

<sup>91</sup> Bambang., 2012. Meningkatkan Daya Saing Perkebunan Kakao Rakyat Melalui Penguatan Kelembagaan Petani "Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera. LEM Sejahtera Sulawesi Tenggara. Kendari.

tetapi juga masalah kelembagaan (Iqbal dan Dalimi, 2006)<sup>92</sup>. Kelembagaan kakao yang ada saat ini dirasakan belum berfungsi dengan baik.

Masalah kelembagaan menjadi masalah penting dalam usahatani kakao. Kelembagaan di perdesaan dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu: pertama, lembaga formal seperti pemerintah desa, BPD, KUD, dan lain-lain. Kedua, kelembagaan tradisional atau lokal. Kelembagaan tersebut biasanya berwujud nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan dan cara-cara hidup yang telah lama hidup dalam komunitas seperti kebiasaan tolong menolong, gotong-royong, simpan pinjam, arisan, lumbung paceklik.

Keberadaan kelembagaan kelompok tani kurang begitu dirasakan. Kelompok tani hanya berperan sebagai tempat informasi dan administrasi saja. Peran kelembagaan/kelompok sebagai unit produksi dan pemasaran hasil belum pernah dirasakan anggota kelompok. Petani dalam memenuhi sarana produksi dilakukan secara sendiri-sendiri sehingga banyak petani kakao tidak melakukan pembudidayaan secara anjuran. Pemasaran kakao juga dilakukan secara individu sehingga standar kualitas biji kakao yang dijual kurang diperhatikan. Akibat pemasaran kakao yang dilakukan secara individu tanpa ada kontrol dari kelompok tani menyebabkan posisi tawar petani rendah sehingga berakibat pada harga jual kakao rendah.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek pernah memiliki rumah coklat di Kecamatan Karanganyang yang dulu berperan sebagai salah satu contoh *pilot project* pengolahan kakao. Rumah Coklat di Kecamatan Karanganyang berperan sebagai lembaga inkubator bisnis yang berada pada pembinaan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek. Rumah Coklat juga digunakan sebagai tempat pembelajaran pembibitan, penanaman, pengolahan sampai dengan pemasaran coklat kepada masyarakat. Namun, saat ini rumah coklat tersebut tidak beroperasi karena proses pengelolaan yang kurang efektif dan efisien. Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat kelembagaan kakao yang kuat diperlukan untuk meningkatkan *bargaining* (daya tawar) produk petani kepada konsumen khususnya industri menengah-besar yang memanfaatkan bahan baku kakao yang berasal dari Kabupaten Trenggalek.

## Penutup

Selama kurun waktu 5-10 tahun terakhir, Kabupaten Trenggalek masih mengandalkan hasil alamnya dalam menopang kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Sebagian besar masyarakat juga bermata pencaharian tidak jauh-jauh dari pemanfaatan kekayaan alam seperti petani dan nelayan. Kondisi tersebut diprediksi tidak akan berubah selama 5 tahun kedepan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sektor lapangan usaha yang menjadi unggulan di Kabupaten Trenggalek adalah **Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan**. Sektor tersebut memiliki kontribusi sektor ekonomi yang terbesar sampai dengan saat ini (2022). Berdasarkan analisis LQ, shiftshare, klassen, sektor tersebut

---

<sup>92</sup> Iqbal, M., dan Dalimi A., 2006. Kebijakan Pengembangan Agribisnis Kakao Melalui Primatani: Kasus Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 4 Nomor 1:p45-52

- juga merupakan sektor basis, cenderung berpotensi, dan tumbuh dengan pesat. Permasalahannya adalah sektor ini memiliki kontribusi yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya.
2. Berbeda dengan sektor lapangan usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, sektor yang kontribusinya terus mengalami kenaikan dengan pertumbuhan yang cepat adalah sektor **Industri Pengolahan**. Namun, sektor ini bukan merupakan sektor basis di struktur perekonomian.
  3. Dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan pengembangan sektoral perekonomian daerah, hendaknya lebih diprioritaskan sektor unggulan yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota yang diperinci lagi sampai **produk unggulan daerah**.
  4. Berdasarkan persepsi stakeholder (*academia, business, community, government, mass media*), **kriteria yang disepakati** dalam menentukan produk unggulan daerah di Kabupaten Trenggalek antara lain:
    - a. Sumbangan terhadap ekonomi daerah
    - b. Penyerapan tenaga kerja
    - c. Sektor basis dan memiliki daya saing tinggi
    - d. Ramah lingkungan
    - e. Ketersediaan pasar
    - f. Ketersediaan bahan baku
    - g. Keterkaitan dengan sektor lainnya
    - h. Dukungan pemerintah
    - i. Kondisi input (infrastruktur, sarpras, teknologi, modal)
  5. **Tiga kriteria penentu** produk unggulan di Kabupaten Trenggalek adalah 1) **Sumbangan** terhadap perekonomian dengan bobot 17,9%; 2) Ketersediaan **bahan baku** dengan bobot 17,9%; dan 3) Ketersediaan **pasar** dengan bobot 17,2%. Pendapat gabungan stakeholder menempatkan peran serta pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan penyediaan infrastruktur pendukung sebagai kriteria yang kurang penting dalam pengembangan produk unggulan daerah di Kabupaten Trenggalek.
  6. Melalui analisis AHP, produk unggulan daerah Kabupaten Trenggalek yang harus diprioritaskan pengembangannya adalah: 1) **Tanaman Pangan**; 2) **Perikanan**; dan 3) **Perkebunan**. Permasalahannya adalah ketiga produk tersebut masih mengandalkan pemasaran bahan mentah dan belum berkembang ke taraf industrialisasi (pengolahan).